



LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL



dayasosbisa



dayasosbisa



Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial

DAFTAR SINGKATAN

Istilah	Keterangan
CSR	Corporate sosial Responsibility
DoS	Duration Of Service
EP	Engagement Performance
HLDN	Hibah Langsung Dalam negeri
HTDP	Hadiah Tidak Diambil Pemenang
HTT	Hadiah Tidak Tertebak
HunTap	Hunian tetap
IKPA	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IPS	Indeks Partisipasi Sosial
IUMK	Izin Usaha Mikro Kecil
K2KRS	Kepahlawanan, keberintidsan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial
KAT	Komunitas Adat Terpencil
KPM	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	Kelompok Usaha Bersama
LK3	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga
LKS	Lembaga Kesejahteraan sosial
MPN	Makam Pahlawan Nasional
NIB	Nomor Induk Berusaha
PDU	Potensi Dunia Usaha
PKAT	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
PENA	Pahlawan Ekonomi Nusantara

Istilah	Keterangan
PKH	Program Keluarga Harapan
PPKS	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ProKUS	Program Kewirausahaan Sosial
PSDS	Potensi dan Sumber Daya Sosial
PSKS	Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
PSM	Pekerja Sosial Masyarakat
Dayamas	Pemberdayaan Masyarakat
PUB	Pengumpulan Uang atau Barang
Puskesmas	Pusat Kesejahteraan Sosial
RB	Reformasi Birokrasi
SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SLRT	Sistem Layanan Rujukan Terpadu
SmArt	Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
TKSK	Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan
TMPN	Taman Makam Pahlawan Nasional
TMPNU	Taman Makam Pahlawan Nasional Utama
ToT	Training of Trainer
UEP	Usaha Ekonomi Produktif
UGB	Undian Gratis Berhadiah
UKS	Usaha Kesejahteraan Sosial

KATA PENGANTAR

DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL

" Indikator pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas"

Edi Suharto, P.HD -





Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan wujud akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebagai unit eselon I pada Kementerian Sosial sebagai salah satu penyelenggara negara.

Penyusunan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selama periode tahun 2022.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2022, perkembangan capaian kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta realisasi anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk evaluasi agar mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, serta mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2023

Edi Suharto, Ph.D



RINGKASAN EKSEKUTIF

capaian

103,58%

Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial merupakan unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada Tahun 2022, program dan kegiatan telah direncanakan untuk mendukung arah kebijakan Kementerian Sosial dan agenda prioritas nasional. Indikator Kinerja Program Ditjen Pemberdayaan Sosial tertuang dalam Perjanjian Kinerja 2022.

Terdapat perubahan perjanjian kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam rangka reviu indikator kinerja dan penyelarasan dengan Perubahan Renstra Kementerian Sosial. Sesuai hasil reviu, Perjanjian Kinerja semula terdiri dari 7 Sasaran Program dan 13 Indikator Kinerja Program menjadi 7 Sasaran Program dan 14 Indikator Kinerja Program.

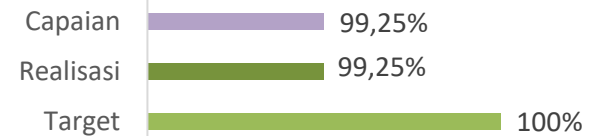
LKj Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran tahun 2022. LKj ini merupakan sarana penyampaian informasi capaian kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial. Nilai Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 yang merupakan rata-rata dari capaian 14 indikator yaitu 57,17% dengan 8 Indikator Kinerja Capaiannya mencapai/lebih dari 100%, dan 42,86% Indikator Kinerja Capaiannya kurang dari 100%. Realisasi Anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial yaitu 99,20% dari Pagu Anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial



TERPENUHINYA KEBUTUHAN DAN HAK DASAR



Persentase (%) penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar



Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar



MENINGKATNYA KEMAMPUAN DALAM MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB DAN PERANAN SOSIAL



Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial



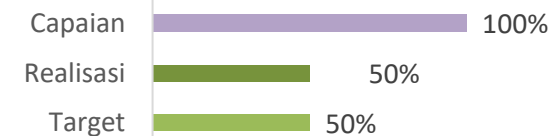
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN SOSIAL EKONOMI



Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

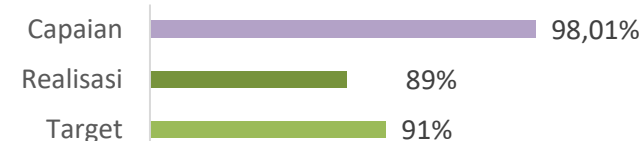


Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya





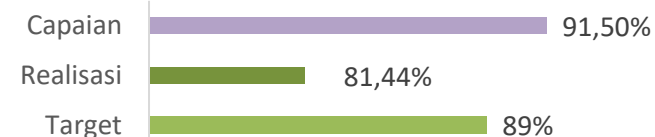
Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar



Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar



Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar



Persentase (%) Daerah yang Menangani aduan/ keluhan sesuai standar

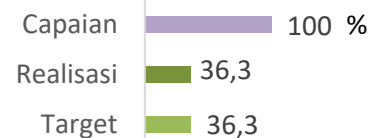




TERWUJUDNYA TATA KELOLA KEMENTERIAN SOSIAL YANG BERKUALITAS



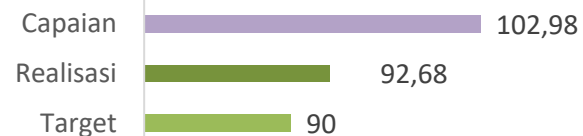
Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial



Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial



Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial



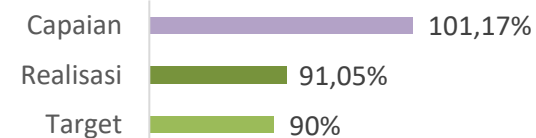
Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan



MENINGKATNYA KEPUASAN STAKEHOLDER TERHADAP LAYANAN KEMENTERIAN SOSIAL

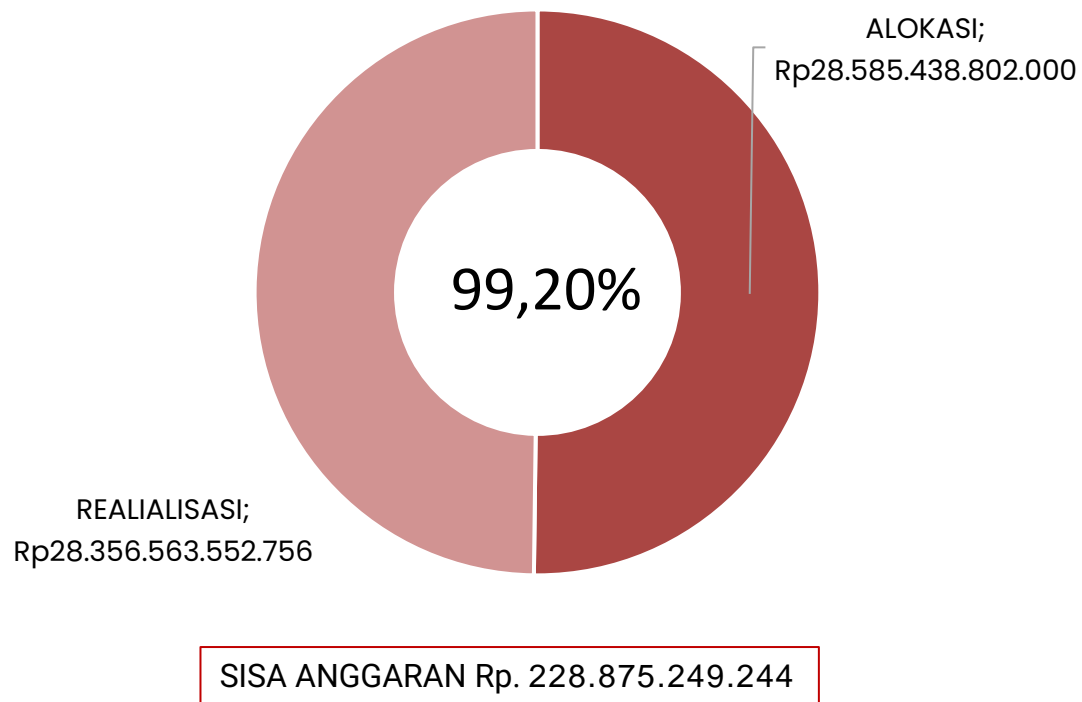


Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial





REALISASI ANGGARAN DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2022



Tahun 2022 terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan sosial. Dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, sehingga terdapat penyesuaian kegiatan sesuai dengan OTK baru tersebut. Ditjen Pemberdayaan Sosial bekerjasama dengan stakeholders terus berusaha agar pelaksanaan program pemberdayaan sosial berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat yang baik bagi penerima manfaat.



DAFTAR ISI



BAB I. PENDAHULUAN

- 11. Latar Belakang
- 12. Gambaran Umum Organisasi
- 14. Aspek Strategis Organisasi
- 17. Isu Strategis Organisasi
- 19. Sistematika Penyajian



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- 21. Perencanaan Strategis
- 25. Rencana Kerja Tahun 2022



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- 32. Capaian Kinerja
- 85. Realisasi Program Prioritas
- 90. Realisasi Lainnya
- 92. Realisasi Anggaran
- 94. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya



BAB IV. PENUTUP

- 99. Kesimpulan dan Saran
- 100. Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG



Tahun 2022 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi Kementerian Sosial, demikian pun dengan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, hal ini diawali dengan ditetapkannya keputusan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemneterian Sosial.

Perubahan yang terjadi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 ini salah satunya adalah perubahan organisasi yang berada di lingkup ditjen pemberdayaan Sosial, dimana pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial terdapat 5 satker terdiri dari Sekretariat ditjen, Direktorat Komunitas adat Terpencil dan Kewirausahaan Sosial, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan, dan Dirktorat Potensi dan Sumber Daya Sosial, dimana 4 Satker selain Sekrretariat Ditjen merupakan satker baru.

Dengan keberadaan 4 satker baru ini berakibat penataulangan Kembali pelaksana program dan kegiatan yang ada, ditambah lagi dengan penugasan baru yang diemban oleh Direktorat jenderal pemberdayaan sosial terkait pelaksanaan program sembako, juga adanya program baru yaitu program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Peran strategis Ditjen pemberdayaan sosial dalam melaksanakan kegiatan program nasional seperti Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Layanan Penyelenggaraan Program Kartu Sembako, Penyelenggaraan Program Sembako, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan, Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Pengembangan PUSKESOS Tingkat Desa/Kelurahan, Pengembangan SLRT Tingkat Kab/Kota, Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsi selama tahun 2022, disusun Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Dirjen Pemberdayaan Sosial atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Ditjen Pemberdayaan Sosial selama periode tahun 2022

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

TUGAS



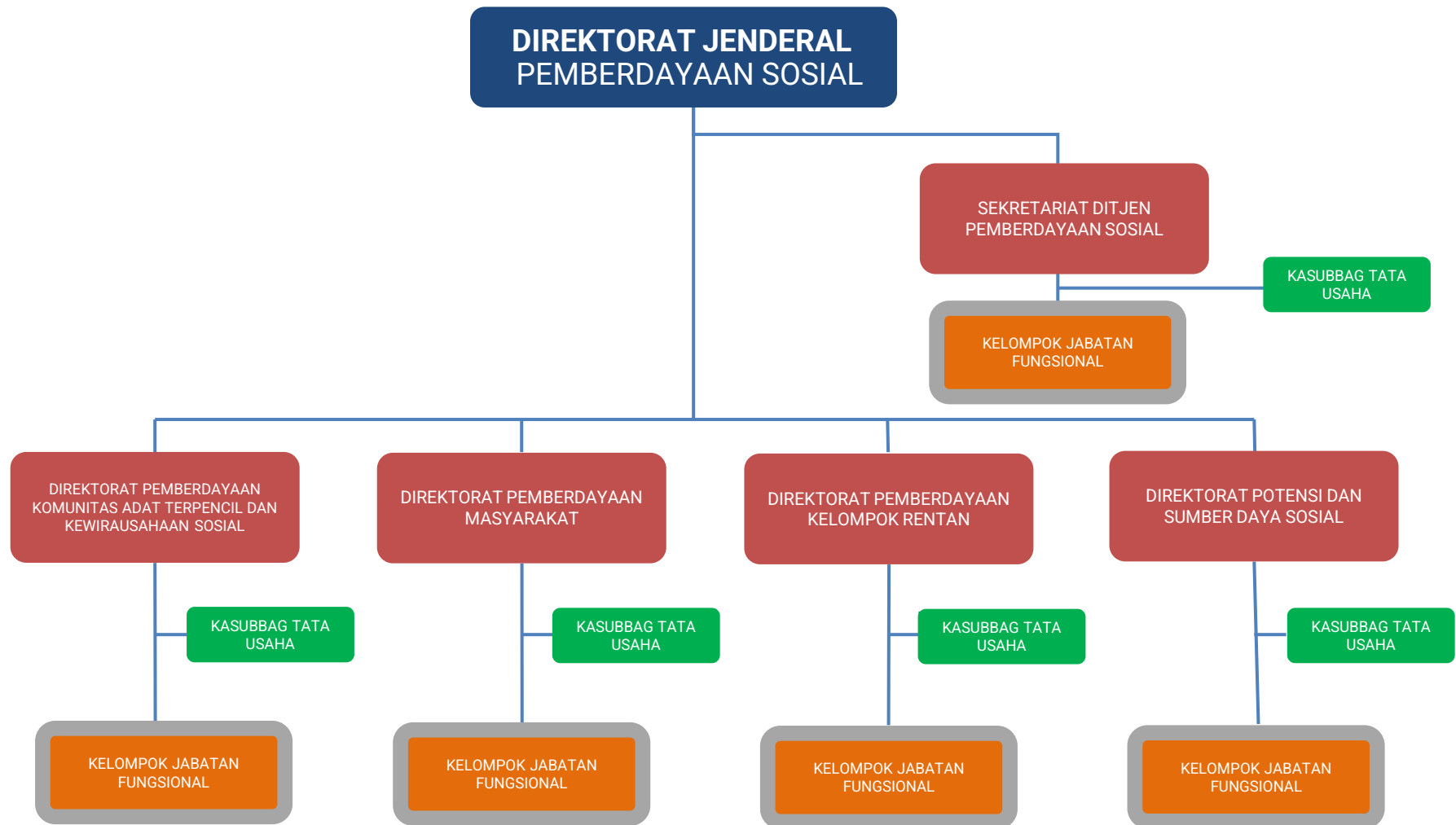
Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

FUNGSI



- o perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- o pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial;
- o penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial;
- o pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial;
- o pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial;
- o pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- o pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

STUKTUR ORGANISASI



C. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

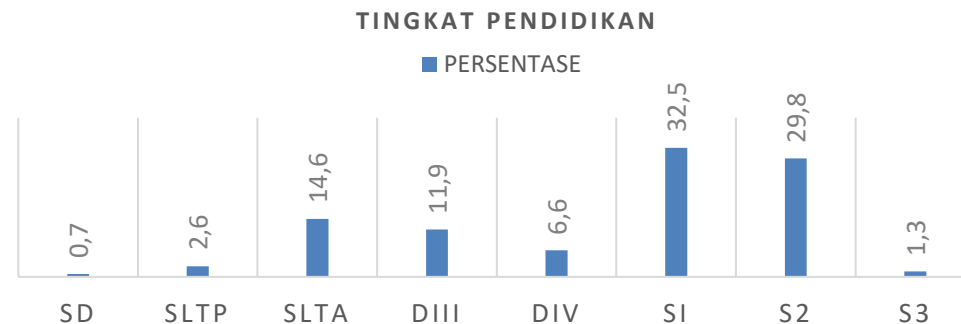
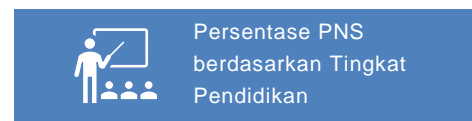
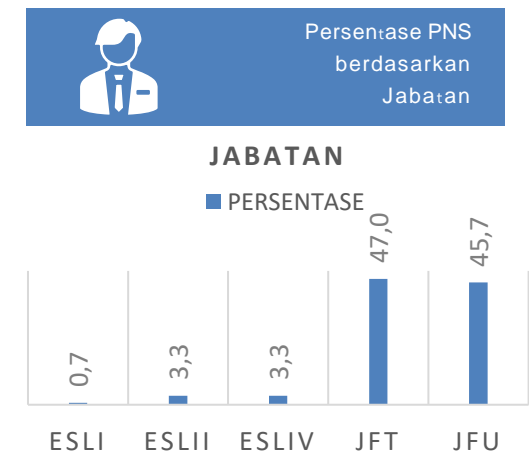
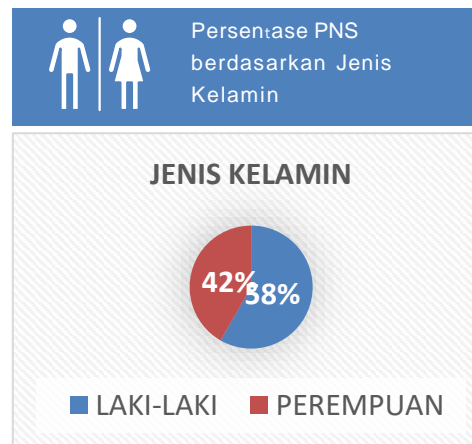
ASPEK TUGAS

Ditjen Dayasos memiliki tugas sebagai berikut:

- ✓ Melaksanakan pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas bagi potensi sumber dan kesejahteraan sosial baik perorangan maupun kelembagaan Mengelola sumber dana bantuan sosial yang bersumber dari UGB dan PUB
- ✓ Melakukan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- ✓ Melaksanakan pemberdayaan sosial dan ekonomi melalui program Kewirausahaan Sosial bagi KPM Sembako
- ✓ Membentuk dan Mengembangkan Sistem Layanan Rujukan Terpadu
- ✓ Melaksanakan Program Restorasi Sosial
- ✓ Melaksanakan Penyaluran Sembako bagi Penduduk Miskin dan rentan

ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA

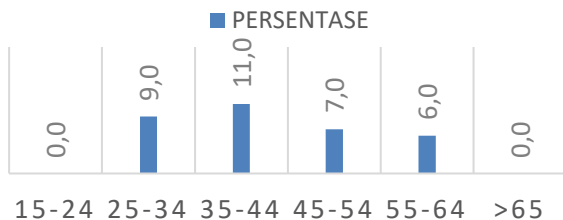
Sesuai data Kepegawaian per 31 Desember 2022, Pegawai Ditjen Pemberdayaan Sosial sebanyak 303 Orang yang terdiri dari 151 orang PNS dan 153 orang PPNPN.





Persentase PNS
berdasarkan umur

KATEGORI UMUR

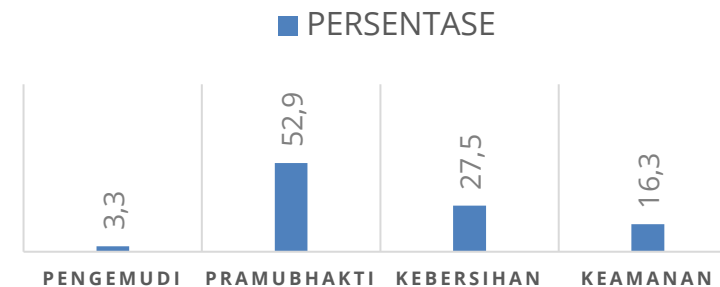


Sesuai data Subbagian Kepegawaian per 31 Desember 2021, Pegawai PPNP Ditjen Pemberdayaan Sosial sebanyak 153 orang yang tersebar di 5 Satker lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.



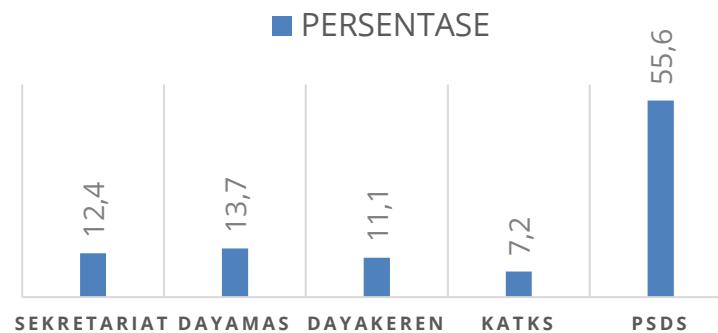
Persentase PPNP
Berdasar Jabatan

PERSENTASE



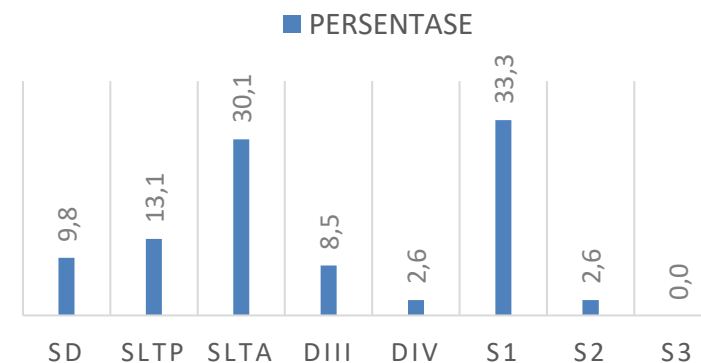
Persentase PPNP
berdasarkan
Satker

SATUAN KERJA



Persentase PPNP
Berdasar tingkat
Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN



ASPEK ANGGARAN



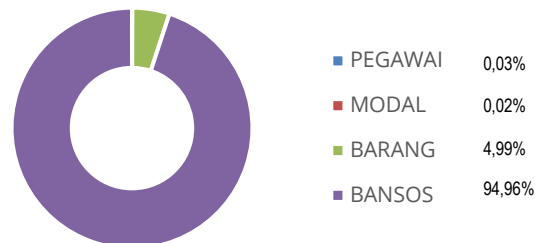
Ditjen Pemberdayaan Sosial pada tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran melalui APBN sebesar Rp428.568.635.905.000,- dengan rincian seperti grafik berikut.

Persentase Anggaran berdasarkan jenis kegiatan
Anggaran Ditjen Daysaso terbagi menjadi 9 Kegiatan. Porsi terbesar pada kegiatan Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan.

■ PERSENTASE

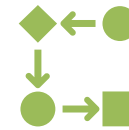


Persentase Anggaran berdasarkan jenis belanja



Porsi terbesar Sekretariat Daysasos adalah Belanja Bansos.

ASPEK TATA LAKSANA



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk seluruh aktivitas pekerjaan. Pada tahun 2022 tidak terdapat reviu SOP atas kegiatan yang mengalami perubahan mendasar.

ASPEK SARANA DAN PRASARANA



Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pemberdayaan Sosial, serta guna efisiensi, efektivitas dan akuntabelnya pelaksanaan program pemberdayaan sosial didukung oleh sarana yaitu perlengkapan komputer, printer, foto copy, scanner dan alat tulis kantor. Serta didukung oleh prasarana ruang kerja, meja kerja, kursi dan kendaraan dinas. Sarana dan prasarana pendukung lainnya yaitu Laman informasi kegiatan program pemberdayaan sosial melalui website (www.sikapdaya.kemsos.go.id), Instagram (@ditjendayasos), facebook (Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial), twitter (@ditjendayasos) dan Youtube.

Fasilitas pelayanan izin UGB dan PUB secara online melalui <https://simppsdb.kemsos.go.id> dan e-SABi

Aplikasi SIKS-NG Modul SLRT
Aplikasi Pelaporan TKSK

D. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu penting dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Indonesia yang sangat relevan dengan tugas dan fungsi Ditjen Pemberdayaan Sosial yakni:



Peningkatan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan Ditjen Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas dalam menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial mempunyai peran penting untuk meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan agar dapat keluar dari garis kemiskinan. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga dengan pendampingan kewirausahaan sosial



Peningkatan kapasitas dan partisipasi PSKS perorangan, PSKS lembaga dan pihak pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial Sebagai upaya meningkatkan partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai peran penting dalam melaksanakan pemberdayaan berupa peningkatan kapasitas bagi potensi sumber dan kesejahteraan sosial baik perorangan maupun kelembagaan.



Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan hak dasar bagi keluarga miskin dan rentan agar terpenuhi kebutuhan dan hak dasarnya melalui penyaluran sembako.



Peningkatan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan Salah satu layanan terpadu penanggulangan kemiskinan skala nasional yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat desa/kelurahan adalah Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) dengan menggunakan Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Melalui Puskesmas, masyarakat yang memiliki masalah dengan program-program pemerintah tersebut bisa menyampaikan keluhan, pertanyaan bahkan pengaduan yang nantinya akan diteruskan kepada pengelola program yang terkait.



Kualitas tata kelola yang baik Dukungan majemen yang baik diperlukan agar program dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak yang baik pada sasaran program. Dukungan manajemen meliputi pengelolaan organisasi dan SDM; komunikasi dan keterbukaan informasi publik; pengelolaan perencanaan, keuangan dan umum serta layanan legislasi.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dijelaskan sebelumnya, Ditjen Pemberdayaan Sosial merumuskan program dan kegiatan yang merujuk pada Rencana Strategis Ditjen Pemberdayaan Sosial. Rumusan perencanaan kinerja akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya, yang diantaranya memuat visi, misi, kebijakan, tujuan, sasaran. Terdapat juga Indikator kinerja yang terukur, yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program kegiatan Ditjen Pemberdayaan Sosial sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Dayasos terdapat tantangan dan permasalahan baik dari sisi eksternal maupun internal. Isu-isu yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Pemberdayaan Sosial antara lain:



Perubahan program Kewirausahaan Sosial (Prokus), menjadi Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara

Implementasi perubahan SOTK baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial



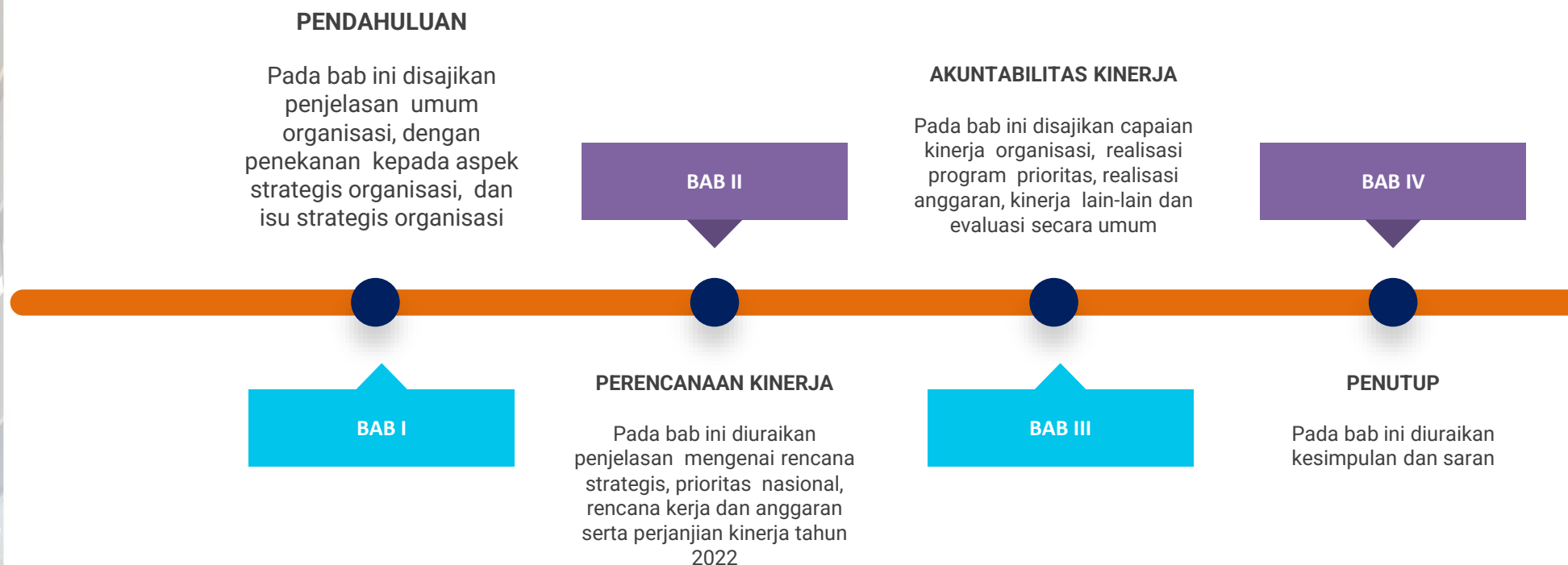
Penugasan penyaluran program sembako yang semula dilaksanan Ditjen Penanganan fakir Miskin sekarang diampu oleh Direktorat Pemberdayaan Kelompok Rentan.

Kontribusi Ditjen Pemberdayaan Sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional berupa penyaluran BLT minyak goreng dan BLT BBM



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Sosial menyusun Rencana Strategi (Renstra) untuk periode tahun 2020 – 2024 berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 406/DYS.I/KPTS/07/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2020 - 2024. Rencana Strategis tersebut telah di reviu pada Tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan Rencana Strategis Kementerian Sosial.

VISI

Visi Ditjen Pemberdayaan Sosial merujuk pada visi Kementerian Sosial.

"Mewujudkan Masyarakat yang Berdaya dan Mandiri untuk mendukung visi Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi."

TUJUAN

Tujuan akhir yang akan dicapai Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial 2020-2024, sebagai berikut..

Meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan;

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi PSKS Perorangan, PSKS lembaga dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; Meningkatkan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan

Mewujudkan kualitas tata kelola yang baik

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, maka Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki misi:

Misi ke 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi PPKS;

Meningkatkan kapasitas dan partisipasi PSKS Memperkuat nilai-nilai sosial dasar melalui Restorasi Sosial

Misi ke 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Meningkatkan jangkauan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Mengembangkan layanan dan rujukan terpadu dalam perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Misi ke 8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya

Mewujudkan reformasi birokrasi Mewujudkan kualitas pelayanan publik dan perluasan jangkauan pelayanan sosial

Misi ke 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Mengoptimalkan layanan kepada PPKS melalui Pusat Kesejahteraan Sosial Mengoptimalkan potensi partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

TARGET KINERJA PROGRAM



Ketercapaian tujuan dari Ditjen Dayasos, maka perlu pencapaian sejumlah sasaran

program yang menggambarkan kondisi yang akan dicapai pada tahun 2024. Masing-masing tujuan memiliki sasaran program yang pengukurannya melalui Indikator Kinerja untuk mengkonfirmasi tujuan yang akan dicapai tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR/ PROGRAM/KEGIATAN		TARGET RENSTRA		
		2022	2023	2024
SP1	Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar			
IKP1.2	Persentase % penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	99	99	99
IKP1.6	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	80	80	80
SP 2	Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial			
IKP2.4	Persentase (%)warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80	85	87
SP3	Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi			
IKP3.1	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60	65	75
IKP3.4	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	50	55	60
SP5	Meningkatnya Profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial			
IKP5.4	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91	92	94
IKP5.6	Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82	82	82
IKP5.8	Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89	89	89
SP6	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial			
IKP6.5	Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74	75	76
SP8	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas			
IKP8.17	Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,3	36,3	36,3
IKP8.22	Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	91	91	91
IKP8.27	Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90	90	90
IKP8.32	Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90	90	90
SP9	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial			
IKP9.4	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90	92	95

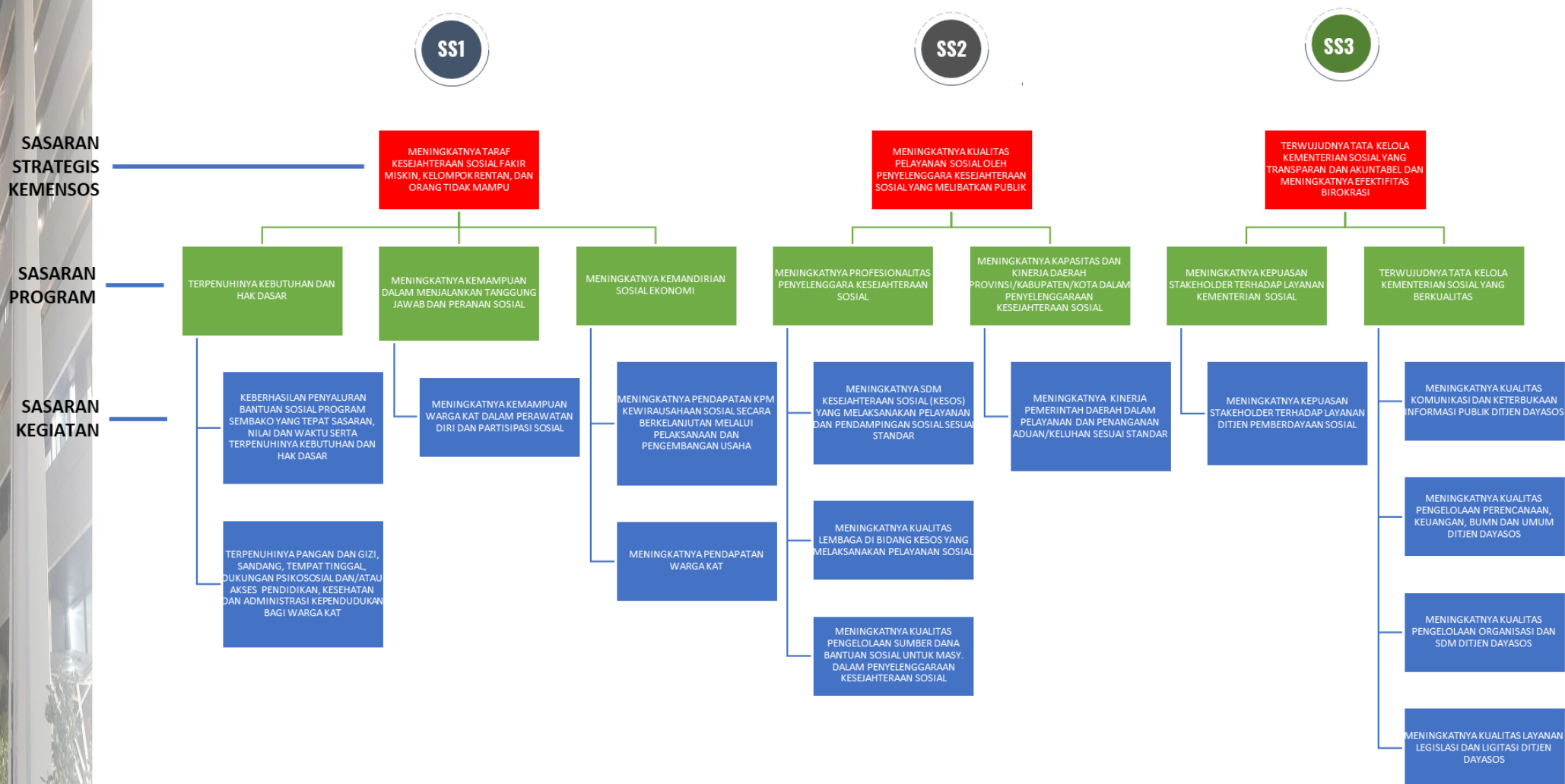
TARGET KINERJA PROGRAM DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL BERDASAR OTK LAMA

Indikator Kinerja Program	2020	2021	2022	2023	2024
SP1. Meningkatnya kemandirian sosial-ekonomi keluarga miskin dan rentan					
IKP1.1 Persentase (%) KPM yang meningkat kepemilikan aset produktifnya	4,18 %	4,36 %	4,56 %	4,77 %	5,01 %
IKP1.2 Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandiriannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	100%	100%	100%	100%	100%
IKP1.3 Persentase (%) Pemanfaatan Hibah Langsung Dalam Negeri untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100%	100%	100%	100%	100%
SP2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi PSKS perorangan dan lembaga dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					
IKP2.1 Indeks Partisipasi Sosial	0,682	0,684	0,686	0,688	0,70
IKP2.2 Persentase (%) Peningkatan Pihak-Pihak yang berperan serta dalam Penanaman Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	1%	1%	1%	1%	1%
SP3. Meningkatnya penyelenggaraan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan					
IKP3 Persentase (%) daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	56%	68%	80%	91%	100%
SP4. Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen organisasi					
IKP4.1 Persentase (%) layanan dukungan manajemen teknis yang akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%

PERUBAHAN PERENCANAAN STRATEGIS OTK LAMA KE OTK BARU


- ✓ OTK lama memuat 4 Sasaran Program sedangkan Perjanjian Kinerja OTK Baru memuat 7 Sasaran Program.
- ✓ OTK lama memuat 15 Indikator Kinerja Program sedangkan Perjanjian Kinerja OTK Baru memuat 14 indikator Kinerja Program.
- ✓ Untuk program nasional TKSK, PSM, masuk pada pada program kegiatan meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial.
- ✓ Penambahan program Baru berupa program sembako
- ✓ Perubahan program Kewirausahaan Sosial semula ProKus menjadi Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)





POHON KINERJA DITJEN DAYASOS




B. RENCANA KERJA TAHUN 2022

ARAH KEBIJAKAN

 **Kebijakan Ditjen Pemberdayaan Sosial diarahkan pada:**

-  Meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan;
-  Meningkatkan kapasitas dan partisipasi PSKS Perorangan, PSKS lembaga dan pihak-pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
-  Meningkatkan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan
-  Mewujudkan kualitas tata kelola yang baik

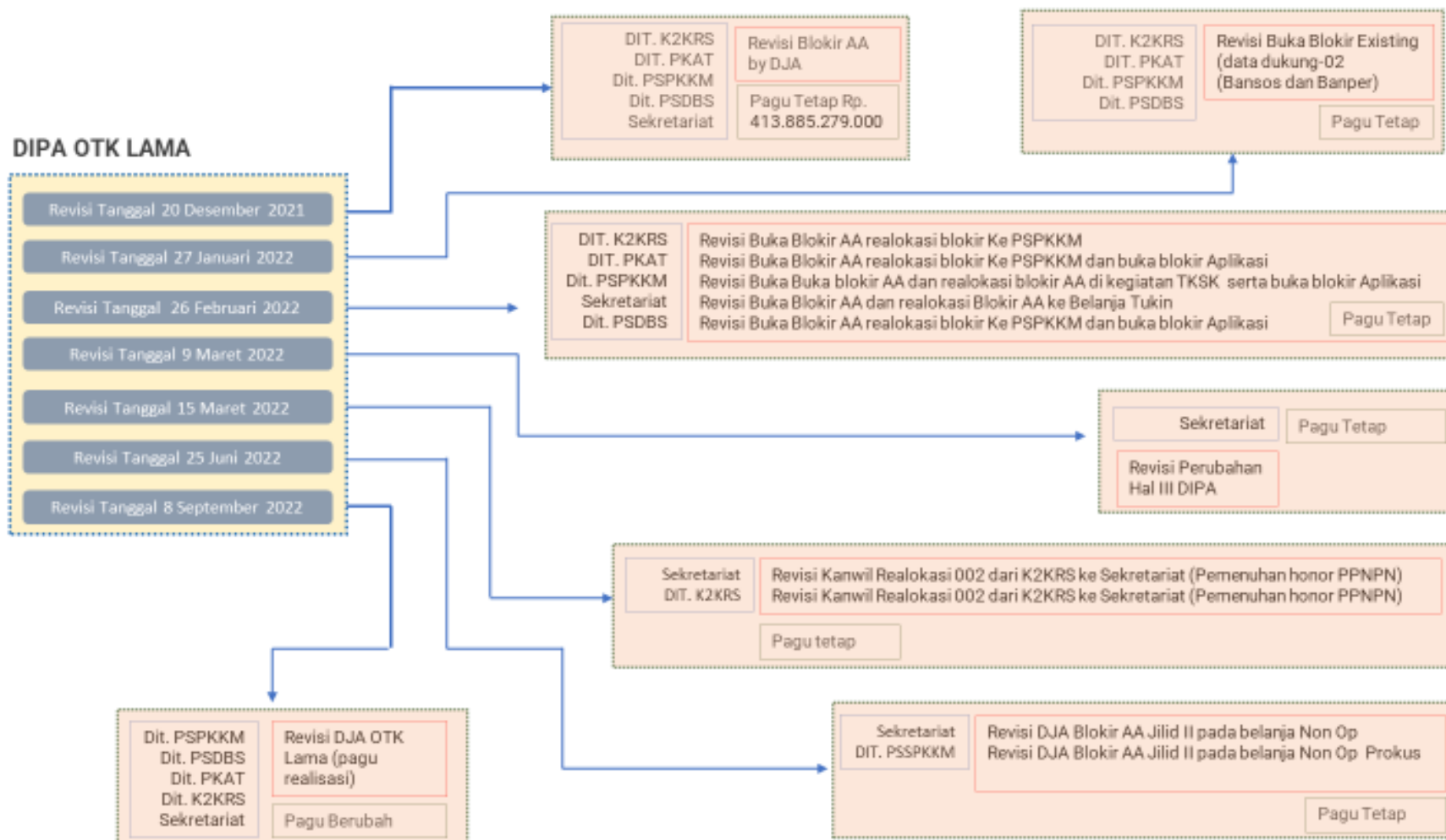
ANGGARAN TAHUN 2022

 Anggaran tahun 2022 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah mengalami perubahan dari alokasi awal.

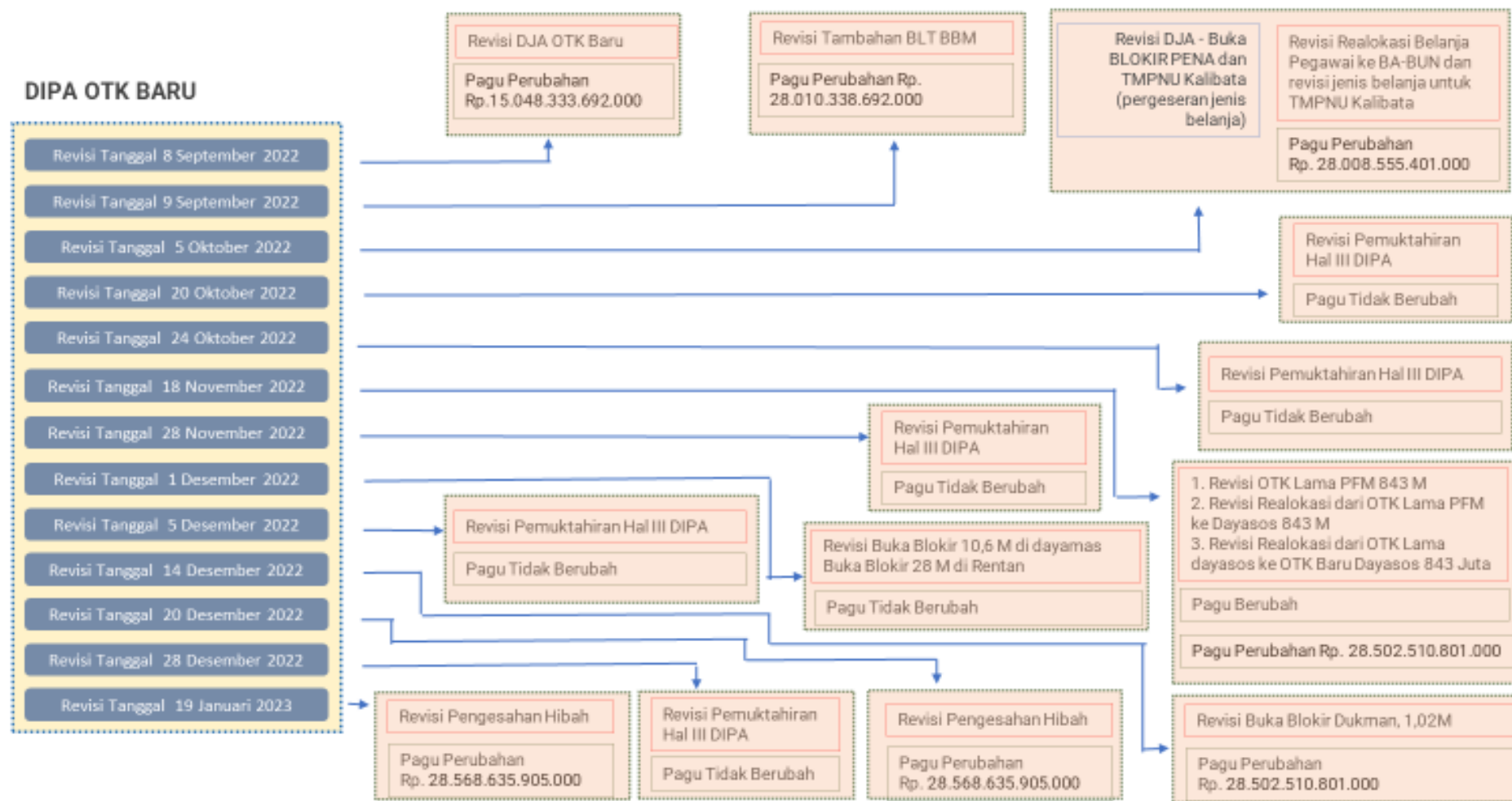
KRONOLOGI ANGGARAN DITJEN DAYASOS 2022



Anggaran tahun 2022 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah mengalami perubahan dari alokasi awal.



KRONOLOGI ANGGARAN DITJEN DAYASOS 2022



Terdapat penambahan alokasi anggaran pada Dijen Pemberdayaan Sosial tahun 2022

1. Program Sembako : Bansos Sembako Rp. 14.673.925.400.000 ,Kartu Sembako Rp 68.200.343.000'- (alokasi di bulan September - DIPA baru Ditjen Pemberdayaan Sosial 2022)
2. Program BLT BBM : revisi tanggal 9 September 2022 senilai Rp.12.962.005.000.000 (tambahan Anggaran Bansos BLT BBM dan Biaya Distribusi Tahun 2022)

PERJANJIAN KINERJA 2022 OTK LAMA

Perjanjian Kinerja pada awal Tahun 2022 mengacu pada Renstra Sekretariat Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024. Ditjen Pemberdayaan Sosial memiliki 7 Sasaran Program dengan 13 Indikator Kinerja Program dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
2.	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80%
3.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60%
		Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	50%
4.	Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82%
		Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89%
5	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74%
6	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,6
		Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	80
		Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90
		Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

PERJANJIAN KINERJA 2022 OTK BARU

Pada bulan September 2022 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022 untuk menyesuaikan Reviu Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial Tahun 2020-2024. Anggaran pada Perjanjian Kinerja juga menyesuaikan dengan perubahan anggaran per September 2022. Anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial telah mengalami perubahan karena penghematan dan pengesahan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam grafik kronologi anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial 2022. Pada Januari senilai Rp413.885.279.000,- menjadi Rp15.048.333.692.000,- pada September.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
		Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
2.	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80%
3.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60%
		Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	50%
4.	Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial	pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82%
		Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89%
5	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74%
6	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,6
		Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	80
		Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90
		Persentase naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DITJEN DAYASOS DARI OTK LAMA KE OTK BARU

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
SP.1 Meningkatkan taraf sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	IKP 1.1 Persentase (%) KPM yang meningkat pendapatannya	20%	26,26%	131,30%
	IKP 1.2 Persentase (%) KPM yang meningkat peran sosialnya	5%	5,79%	115,80%
	IKP 1.3 Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemampuannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar	33,76%	33,76%	100,00%
SP.2 Meningkatkan kapasitas dan partisipasi PSKS perorangan, PSKS lembaga dan pihak lain dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	IKP 2.1 Indeks Partisipasi Sosial	0,684	0,823	120,32%
	IKP 2.2 Persentase (%) PSKS lembaga yang meningkat peran sertanya dalam penyelenggaraan kesos melalui pemanfaatan HDN	7%	16,66%	833,00%
	IKP 2.3 Persentase (%) peningkatan pihak-pihak yang berkontribusi dalam Restorasi Sosial	10%	38,06%	380,60%
	IKP 2.4 Persentase (%) penyelenggara PUB yang bersinergi dengan Kemensos dalam pemanfaatan sumbangan masyarakat untuk penyelenggaraan kesos	59%	56,58%	95,90%
	IKP 2.5 Persentase generasi muda yang memahami nilai-nilai kepelawanan, keperintisan dan kesetiaawanan sosial	10%	6,06%	60,60%
SP.3 Meningkatkan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan	IKP 3.1 Persentase (%) Penanganan keluhan masyarakat oleh Puskesmas-SLRT Kab/kota dan Puskesmas-SLRT Desa/Kel	70,00%	100,00%	142,86%
	IKP 3.2 Persentase (%) Pemerintah Daerah yang melaksanakan kewenangannya di bidang pemberdayaan sosial sesuai UU No.23 Tahun 2014	56,42%	68,03%	120,58%
SP.4 Terwujudnya kualitas tata kelola yang baik pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial	IKP 4.1 Nilai Kinerja Anggaran	85	86,45	101,71%
	IKP 4.2 Nilai SAKIP	81	76,03	93,86%
	IKP 4.3 Nilai PMPRB	32,6	32,87	100,83%
	IKP 4.4 Nilai Kepuasan Layanan	80	86,03	107,54%
	IKP 4.5 Persentase (%) Satuan Kerja yang memiliki predikat WBK/WBBM	100%	100%	100,00%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar	Persentase (%) penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
		Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
2.	Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80%
3.	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENAS) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	60%
		Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	50%
4.	Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial	pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82%
		Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89%
5	Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74%
6	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,6
		Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	80
		Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90
		Persentase naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90
7	Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

PENJELASAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA DI BULAN JANUARI DAN BULAN SEPTEMBER 2022

Perjanjian Kinerja Dirjen Pemberdayaan Sosial mengalami perubahan pada bulan September 2022, hal ini dikarenakan :

- ✓ Turunnya DIPA baru pada bulan September dengan penambahan satu program baru yaitu program sembako yang sebelumnya ada di Ditjen Fakir Miskin.
- ✓ Bertambahnya alokasi anggaran pada Ditjen Pemberdayaan Sosial dikarenakan masuknya alokasi anggran untuk program baru.

Poin Perubahan

- ✓ Perjanjian Kinerja OTK lama memuat 4 Sasaran Program sedangkan Perjanjian Kinerja OTK Baru memuat 7 Sasaran Program.
- ✓ Perjanjian Kinerja OTK lama memuat 15 Indokator Kinerja Program sedangkan Perjanjian Kinerja OTK Baru memuat 14 indikator Kinerja Program.
- ✓ Pada Perjanjian Kinerja OTK baru tidak terlihat lagi indikator atas program prioritas nasional (SLRT, Puskesmas), untuk indikator ini ada pada indikator kinerja kegiatan pada pengampu di UKE 2 dalam hal ini Direktorat Pemberdayaan Masyarakat.
- ✓ Untuk program nasional lainnya TSKS, PSM, masuk pada pada program kegiatan meingkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

SASARAN PROGRAM

01

Terpenuhinya kebutuhan dan hak dasar



Indikator Kinerja Program:



Persentase % penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

TARGET :100%
REALISASI : 99,25%
CAPAIAN : 99,25%



Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar.

TARGET :100%
REALISASI : 100%
CAPAIAN : 100%

**Rata-rata Capaian Sasaran Program
1 sebesar : 99,62%**



Tabel 1.1
Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja Program

IKP	Indikator	Capaian IKP (%)	Komponen Pembentuk	Capaian IKK (%)
IKP 1.1	Persentase (%) penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar.	99,62	IKK 1.4 Persentase (%) penerima manfaat Program Sembako yang terpenuhi kebutuhan pangan dan gizi	99,25
IKP 1.2	Persentase (%) warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar.		IKK 1.1 Persentase (%) KAT yang terpenuhi pangan dan gizi, tempat tinggal, dukungan psikososial dan/atau akses pendidikan, Kesehatan dan administrasi kependudukan bagi warga KAT	100

Indikator Kinerja Program 1.1

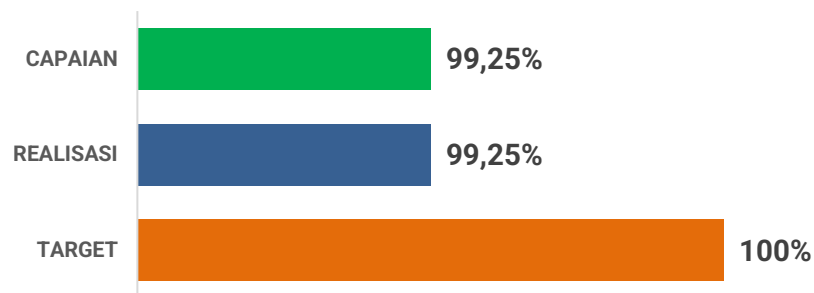
Persentase % penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

Secara operasional yang dimaksud penerima manfaat adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat program rehabilitasi sosial, program perlindungan dan jaminan sosial, dan program pemberdayaan sosial.

Kebutuhan dan hak dasar bagi penerima manfaat program sembako adalah pangan sehingga terlindungi dari kelaparan dan kematian

Terpenuhi kebutuhan dan hak dasar penerima manfaat dalam program sembako ini dilihat dari sukses transaksi yang dilakukan.

Program sembako adalah program bantuan sosial pangan yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial



Capaian kinerja indikator 1.1 Tahun 2022 sebesar 99,25%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

99,25%

n : Jumlah penerima manfaat bantuan sosial sembako yang terpenuhi kebutuhan pangan

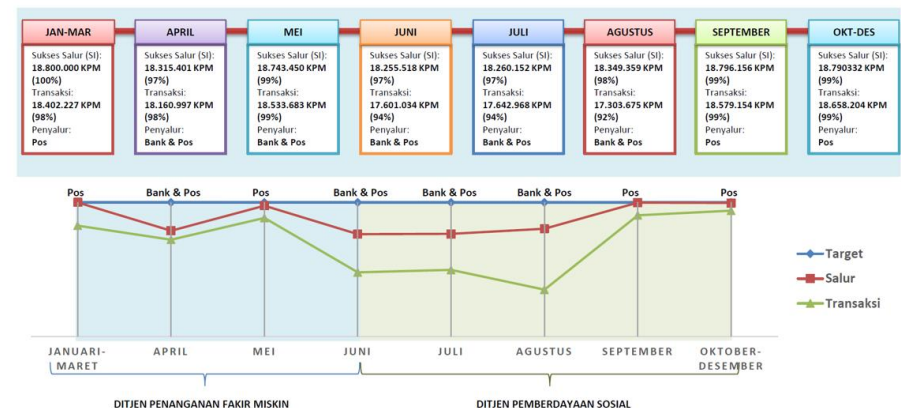
t : Jumlah Penerima Manfaat Bansos sembako

Capaian persentase penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan hak dasar sebesar 99,25% berdasar dari sukses transaksi dimana penerima manfaat program sembako telah menarik uang dari rekening untuk dibelanjakan.

Data transaksi diperoleh berdasarkan hasil rekon data antara Kemensos dengan mitra penyalur (himbara/pos).

Sasaran Program Sembako TA 2022 adalah sebanyak 18.800.000 KPM keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS dengan nilai bantuan sosial program sembako sejumlah Rp 200.000,- setiap bulan atau sesuai dengan kebijakan pemerintah, Sebaran penerima manfaat terdapat di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Capaian Program Sembako Tahun 2022



Data KPM program sembako bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, Penyaluran program sembako tahun 2022 dilaksanakan bekerja sama dengan PT POS , pendampingan dan pemantauan program sembako dilaksanakan oleh pendamping sosial dan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota

Selisih dana yang tidak tersalurkan

Anggaran program bantuan sosial sembako semula sebesar Rp. 45.120.000.000.000,- di perjalanan waktu terjadi tunggakan hutang jasa distribusi salur pada tahun 2021 yang harus dibayarkan pada tahun 2022 sebesar Rp. 493.112.400.000,- yang terjadi saat penyaluran bantuan di tahun 2021, sehingga pagu anggaran sembako tahun 2022 menjadi menjadi Rp.44.626.887.600.000,- terealisasi sebesar Rp. **44.513.480.200.000**, sisa anggaran bantuan sosial sembako sebesar Rp. **113.390.400.000** kembali ke Kas Negara.

Alasan Penyaluran program Sembako tidak mencapai 100%

Penyaluran program bantuan program sembako tidak mencapai 100%, dikarenakan hal-hal sebagai berikut : 1) terdapat Kepala Keluarga Tunggal, KPM yang telah menjadi PNS/Polri/TNI, KPM menolak, KPM telah mampu atas informasi Pemda, KPM tidak ditemukan, KPM diluar kota, KPM dibawah umur, KPM Ganda dalam 1 KK, KPM diluar negeri, KPM pindah alamat, KPM sudah dapat bantuan BLT DD.

Kendala dan tantangan penyaluran Bansos Sembako

Kendala dan tantangan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Bansos tahun 2022, diantaranya:

- ✓ Kualitas data pensasaran perlu menjadi perhatian, sehingga perlu dipastikan data yang diterima penyalur adalah data yang clean and clear.
- ✓ Adanya perubahan mekanisme yang dinamis dengan waktu penyaluran yang terbatas.
- ✓ Apabila disalurkan secara nontunai sebaiknya terhadap KKS yang didistribusikan ke penerima berdasarkan data SP2D bukan data burekol.
- ✓ Sosialisasi dan edukasi perubahan kebijakan perlu dilaksanakan lebih masif kembali dari sisi Kemensos dan pihak penyalur melalui bantuan pendamping sosial



Hasil pemantauan

Hasil Pemantauan Terpadu Pelaksanaan Bansos Tahun 2022

- ✓ Telah dilaksanakan pemantauan terpadu yang dilakukan oleh Kemenko PMK, Set. TNP2K, Setkab, KSP dan Kemensos terkait pelaksanaan BLT-BBM tahap 2 yang disalurkan secara bersamaan dengan penyaluran PKH Triwulan IV, Sembako Oktober Desember serta pelaksanaan DTU 2%. BLT-BBM dan bansos reguler tersebut disalurkan secara tunai melalui PT. Pos.
- ✓ Secara umum hasil pemantauan menunjukkan bahwa pelaksanaan penyaluran melalui PT. Pos berjalan baik dan patuh terhadap prinsip tepat administrasi, tepat waktu, dan tempat jumlah.
- ✓ Berdasarkan hasil pemantauan, sebanyak 41,2% KPM menerima 3 bantuan sekaligus, sementara 2,8% KPM hanya menerima BLT-BBM. Jumlah bantuan yang diterima KPM cukup bervariasi, mulai dari Rp 300.000 hingga Rp 3.000.000, tergantung dari jenis dan komponen bantuan yang diterima oleh KPM.
- ✓ Pada saat penyaluran secara tunai melalui PT. Pos, penerima yang memiliki identitas kependudukan (KK/KTP) yang berbeda dengan yang tertera pada daftar nominatif (danom) tetap bisa menerima bantuan dengan menunjukkan surat keterangan dari desa.
- ✓ Penyaluran bansos tetap mempertimbangkan dan sensitif terhadap kondisi kelompok penerima yang rentan (lansia, penyandang disabilitas dan sakit keras tanpa perwakilan), melalui kunjungan ke rumah atau adanya antrian khusus.
- ✓ Mayoritas pemanfaatan dana bantuan digunakan untuk membeli bahan pangan, dan keperluan anak/sekolah.
- ✓ Perbaikan penerimaan manfaat program BLT-BBM dan bansos reguler pada keluarga exclusion error di desil 1 hanya terlihat pada penyaluran BLT-BBM tahap 1.

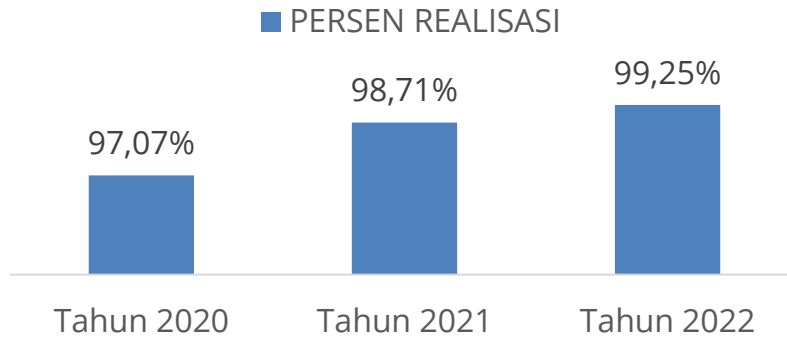
Proses Peralihan Program Sembako dari Ditjen PFM ke Ditjen Dayasos

BULAN	PERIODE PENYALURAN	PENYALUR	UKE I	KEPDIRJEN KUOTA
Januari	Januari - Maret	Pos	Ditjen PFM	Kepdirjen PFM No.26/SK/HK.01/2/2022
Februari		Pos		
Maret		Pos		
April	April-Juni	Pos		Kepdirjen PFM No.43/SK/HK.01/4/2022
	April	Bank		
Mei	April-Juni	Pos		
	Mei	Pos		
Juni	April-Juni	Pos		
	Juni-Juli	Bank		
Juli	Juni-Juli	Bank	Ditjen Dayasos	Kepdirjen Dayasos No.130/5/HK.01/8/2022
	Juli-September	Pos		
Agustus	Juli-September	Pos		
	Agustus	Bank		
September	Juli-September	Pos		
	September	Bank		
Oktober	Oktober-Desember	Pos		
November				
Desember				



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

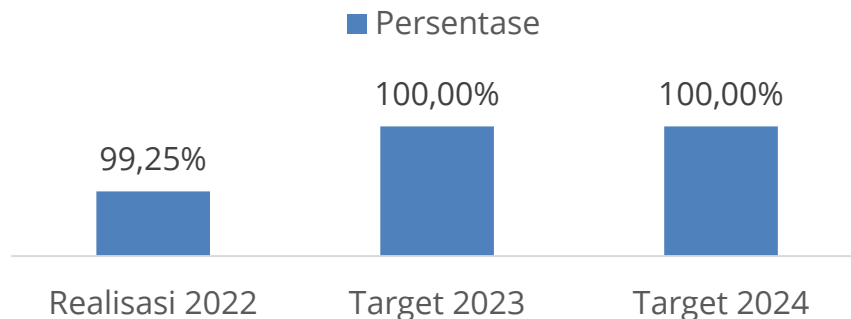
Perbandingan realisasi capaian kinerja dengan tahun sebelumnya di bandingkan dengan pencapaian realisasi penyaluran sbb :



Dibandingkan dengan realisasi penyaluran 2 tahun sebelumnya, realisasi penyaluran sembako terus mengalami peningkatan.

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 1.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar %, artinya realisasi tahun 2022 belum memenuhi target 2024. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mendorong pencapaian target jangka menengah



Indikator Kinerja Program 1.2

Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

Secara operasional yang dimaksud warga KAT adalah anggota KAT yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan komunitas di lokasi KAT.

Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

Pemenuhan kebutuhan dasar dilaksanakan melalui bantuan stimulan selama proses pemberdayaan. Pemenuhan kebutuhan diserahkan berdasarkan assessment, bantuannya berupa : jaminan hidup, jaminan kerja, peralatan rumah tangga , bibit tanaman.



Capaian kinerja indikator 1.2 Tahun 2022 sebesar 100%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

100%

n : Jumlah warga KAT yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar

t : Jumlah warga KAT yang menerima program pemberdayaan

Capaian Persentase warga Komunitas adat terpencil (KAT) yang kebutuhan dan hak dasar berdasar sumberdata rekapitulasi bantuan yang disalurkan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh LKS pendamping pemberdayaan KAT dan berita acara penerimaan bantuan.

Dalam pemenuhan hak dasar bagi warga (KAT) tahun 2022 dilakukan pendampingan oleh 43 LKS untuk 78 Lokasi KAT di 20 Provinsi dengan jumlah warga KAT yang diberdayakan sebanyak 3.500 KK

kebijakan pemberdayaan sosial terhadap KAT dengan memberikan Bantuan Stimulan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT salah satunya dalam bentuk Bantuan Stimulan Pemukiman, Bantuan Balai Sosial (Community Center), Bantuan Sarana Air Bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya, Bantuan Sarana Pendidikan, Bantuan sarana dukungan Community Center, Bantuan Usaha Penghidupan Berkelanjutan Warga KAT serta bantuan sosial lainnya sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan warga KAT di lokasi. Pemberian bantuan sosial pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan satu kesatuan dengan proses pendampingan dan peningkatan kapasitas warga Komunitas Adat Terpencil. Pemberian Bantuan sosial pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan untuk :

- ✓ Meningkatkan kemandirian warga KAT dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
- ✓ Meningkatkan aksesibilitas warga KAT terhadap berbagai layanan sosial dan pemerintahan.
- ✓ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana untuk perbaikan kualitas hidup dan lingkungan warga KAT.
- ✓ Meningkatkan keterampilan dan produktivitas warga KAT melalui usaha ekonomi produktif untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan.
- ✓ Meningkatkan sinergi dan kerjasama lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemberdayaan KAT.

Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT

Bantuan stimulan pemberdayaan KAT diberikan kepada warga yang berada di lokasi pemberdayaan tahun ke I, II dan III tahun anggaran 2022 untuk menstimulasi warga KAT agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

Adapun bantuan yang diberikan sebesar Rp.5.000.000,-/KK/Lokasi sesuai asesmen kebutuhan. Bantuan yang diberikan berupa bantuan jaminan hidup, peralatan kerja, peralatan rumah tangga, bibit tanaman, dan bantuan lainnya sesuai hasil assessment kebutuhan kolektif dan riil warga KAT di lokasi pemberdayaan.



Penyerahan Bantuan Stimulan di Kampung Lules, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua

Bantuan stimulan pemberdayaan KAT telah disalurkan kepada 3.500 keluarga KAT di 20 Provinsi, 38 Kabupaten, 61 Kecamatan, 71 Desa, dan 78 Lokasi pemberdayaan KAT dengan capaian sebesar 100%. Bantuan tersebut diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar warga KAT selama proses pemberdayaan dilaksanakan.

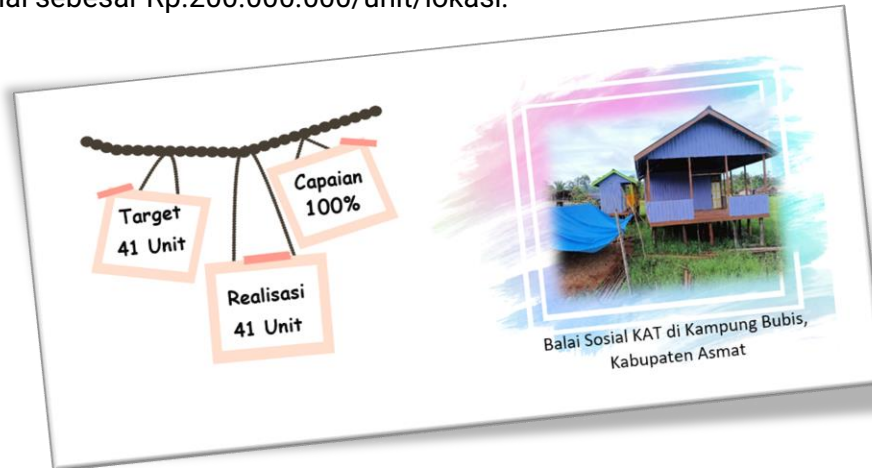


Penyerahan Bantuan Stimulan di Kampung Maluang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Bantuan Balai Sosial (Community Center)

Bantuan balai sosial diberikan ke lokasi pemberdayaan tahun I dan II tahun anggaran 2022 sebagai bangunan serbaguna untuk berbagai kegiatan pemberdayaan di lokasi.

Balai sosial di lokasi KAT difungsikan oleh warga KAT sebagai sarana berkumpul, bersosialisasi, berkesenian, pertemuan adat, musyawarah, belajar dan bermain anak serta kegiatan warga lainnya. Besaran bantuan balai sosial sebesar Rp.200.000.000/unit/lokasi.



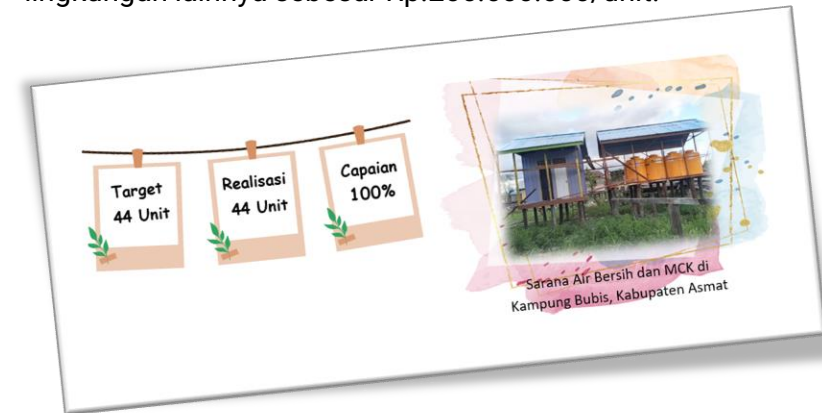
Bantuan balai sosial telah disalurkan kepada 41 lokasi pemberdayaan KAT tahun I dengan capaian sebesar 100%. Balai sosial dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat.



Bantuan Sarana Air Bersih, MCK dan Sarana Lingkungan Lainnya

Bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya diberikan ke lokasi pemberdayaan tahun I dan II tahun anggaran 2022 diberikan untuk memenuhi kebutuhan warga akan fasilitas air bersih yang layak, sarana MCK bagi warga KAT serta sarana lingkungan lainnya di lokasi.

Besaran bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan sebesar Rp.200.000.000/unit.



Bantuan sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan telah disalurkan kepada 44 lokasi pemberdayaan tahun I (1 unit/lokasi) dengan capaian sebesar 100%. Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya merupakan kebutuhan penting dan mendasar warga KAT di lokasi. Sama seperti balai sosial, pembangunan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat.

Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial/Peningkatan Kualitas Hunian

Bantuan stimulan pemukiman sosial kepada warga KAT diberikan dalam bentuk uang untuk pengadaan Bahan Bangunan Rumah (BBR). Bantuan stimulan pemukiman sosial diberikan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hunian yang layak bagi warga KAT.

Indeks Bantuan Stimulan Pemukiman Sosial Rp.50.000.000/Unit



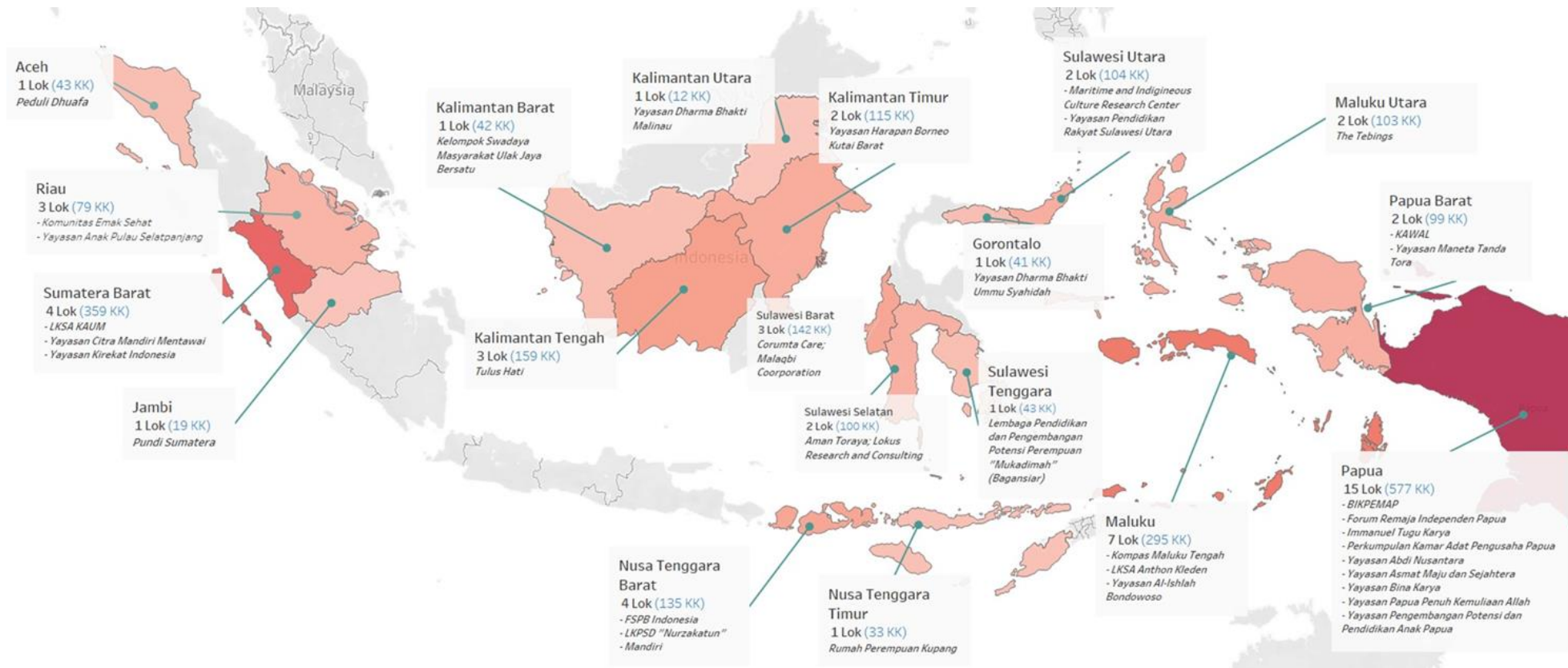
Bantuan stimulan pemukiman sosial telah disalurkan kepada 402 KK prioritas di lokasi PKAT Papua dan Papua Barat (1 rumah/KK) dengan capaian sebesar 100%. Sama seperti pembangunan balai sosial dan pembangunan Sarana air bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya, dibangun secara swadaya dengan partisipasi aktif masyarakat



Pembangunan Rumah KAT di Kampung Pagai, Kab. Jayapura - Papua

SEBARAN PEMBERDAYAAN WARGA KAT 2022

Target Pemberdayaan Warga KAT Tahun 2022 tersebar di 78 Lokasi dengan Jumlah Warga KAT 3.500 KK dan LKS Pendamping sejumlah 43 LKS.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

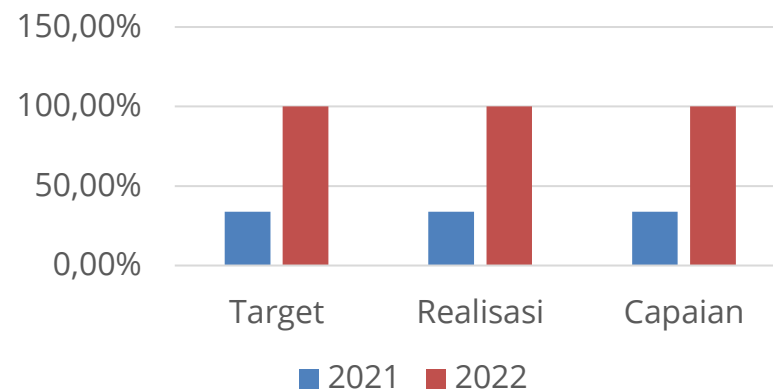
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya dimana outcome dari indikator kinerja ini adalah bagaimana mereka bisa meningkat kemampuannya dalam mengakses layanan sosial dasar, termasuk akses terhadap program-program perlindungan sosial. Nomor Induk Kependudukan (NIK) diperlukan sebagai data primer yang nantinya akan diusulkan ke DTKS sehingga warga KAT menjadi penerima program-program perlindungan sosial.

Realisasi target kinerja untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut :



Capaian kinerja indikator warga KAT meningkat kemampuannya dalam mengakses pelayanan sosial dasar Tahun 2021 sebesar 100%.

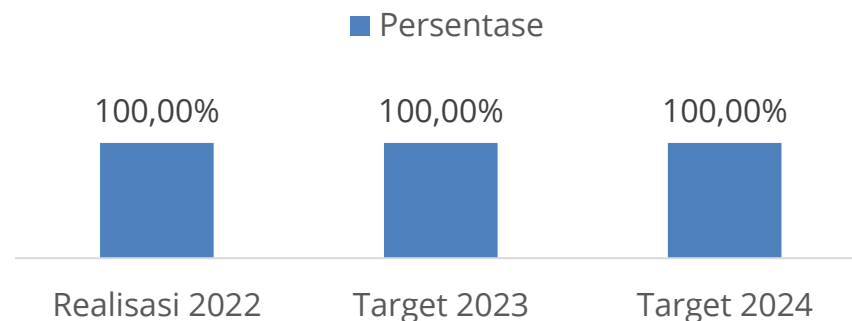
Perbandingan dengan capaian indikator kinerja untuk tahun Tahun 2022 capaian sebesar 100%, perbandingan sebagaimana table berikut :



Perbandingan realisasi capaian target tahun 2021 dan tahun 2022

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 1.2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, artinya realisasi tahun 2022 belum memenuhi target 2024. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mendorong pencapaian target jangka menengah



SASARAN PROGRAM

02

Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial

Indikator Kinerja Program:

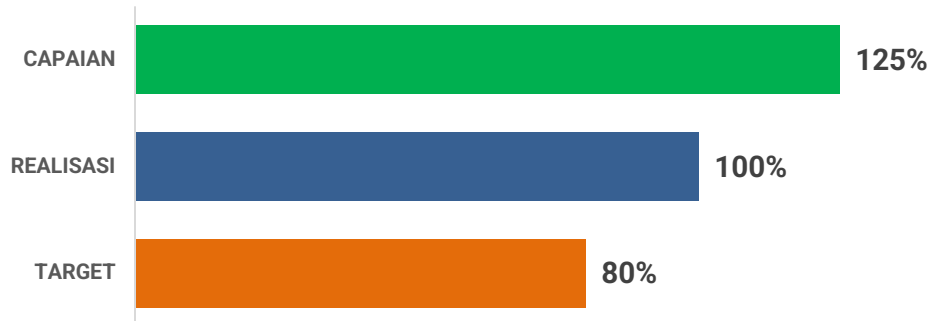
Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial

TARGET : 80%
REALISASI : 100%
CAPAIAN : 125%

Rata-rata Capaian Sasaran Program
1 sebesar : 125%

Secara operasional yang dimaksud warga KAT adalah anggota KAT yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan komunitas di lokasi KAT.

Meningkat kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peran sosial adalah kemampuan Penerima layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan aktualisasi diri



Capaian indikator kinerja program 2.1 Tahun 2022 sebesar 100%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

100%

n : Jumlah warga KAT yang memiliki kemampuan Penerima layanan dalam perawatan diri, perlindungan diri, partisipasi sosial, dan/atau aktualisasi diri
 t : Jumlah warga KAT yang menerima program pemberdayaan

Capaian kinerja warga KAT yang menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial dilakukan dengan pendampingan oleh LKS kepada kelompok masyarakat (Pokmas), Pokmas merupakan wujud partisipasi warga KAT dalam proses pemberdayaan. Partisipasi dalam proses pemberdayaan ini merupakan kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial warga KAT.

Menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, bisa dilihat dari proses yang terjadi sebelum bantuan pemberdayaan KAT tersalurkan, bahwa setiap bantuan pemberdayaan KAT yang diberikan dan diterima oleh warga KAT tersebut sudah merupakan bentuk wujud dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan warga Komunitas Adat terpencil, hal ini dikarenakan mekanisme dalam mendapatkan bantuan program pemberdayaan KAT sebagai berikut :

Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja Program

IKP	Indikator	Capaian IKP (%)	Komponen Pembentuk	Capaian IKK (%)
IKP 2.1	Persentase % warga KAT yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial.	125	IKK 2.1 Persentase (%) KAT yang meningkat kemampuannya dalam perawatan diri dan partisipasi sosial.	125

- ✓ Warga KAT membentuk kelompok masyarakat penerima bantuan dengan susunan pengurus terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang seluruhnya merupakan unsur warga di lokasi KAT yang susunan keanggotaannya disahkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten;
- ✓ Kelompok masyarakat melakukan musyawarah untuk menyusun RAB/Kerangka Acuan Kerja (KAK) bantuan sosial pemberdayaan KAT dan penetapan toko penyedia berdasarkan kesepakatan warga KAT.
- ✓ KAK mencerminkan hal-hal *Merupakan hasil musyawarah mufakat warga KAT; Berdasarkan pada potensi dan kebutuhan bersama warga KAT; Mengedepankan dan mendorong partisipasi masyarakat, kebersamaan dan gotong royong; dan berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan.*

Pemberdayaan KAT berbasis Stakeholders (PKATBest) merupakan model dan strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk menguatkan esensi pemberdayaan sekaligus meningkatkan sinergi, kolaborasi dan kerja sama dari berbagai pihak (stakeholders). Perlibatan LKS/Orsos dalam proses pemberdayaan KAT khususnya dalam pendampingan warga KAT didasarkan pada posisi dan peran LKS/Orsos yang merupakan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang memiliki rekam jejak, kapasitas dan jaringan kelembagaan yang luas yang mampu memberikan kontribusi nyata dalam proses pemberdayaan dan peningkatan kemandirian warga KAT.

Dalam melaksanakan pendampingan pemberdayaan terhadap warga KAT LKS menjalankan tugas dan peran sebagai berikut:

- ✓ Menyusun program kegiatan serta mengidentifikasi masalah, kebutuhan, potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial di lokasi KAT yang menjadi tuis dampingannya
- ✓ Mensosialisasikan program pemberdayaan sosial bagi komunitas adat terpencil kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat sekitar dampingan
- ✓ Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui sinergi, advokasi dan hubungan lembaga/masyarakat
- ✓ Melaksanakan sosialisasi dan sinergi lintas sektor serta rencana kerja pendampinga



Pendampingan Komunitas adat Terpencil telah dilaksanakan di 20 Provinsi, 38 Kabupaten, 61 Kecamatan, 71 Desa, dan 78 Lokasi pemberdayaan KAT dan jumlah warga yang didampingi sebanyak 3.500 KK dengan capaian 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Komunitas dengan indikator program Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena ditahun sebelumnya tidak ada indikator mengenai meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, adapun indikator untuk pemberdayaan KAT ditahun 2021 adalah seperti gambar dibawah ini

SASARAN KEGIATAN 1

Meningkatnya kemampuan warga KAT dalam memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses layanan sosial dasar



PERSENTASE % WARGA KAT YANG MEMILIKI TAMBAHAN SUMBER MATA PENCAHARIAN

TARGET	33,76 %
REALISASI	33,76 %
CAPAIAN	100 %



PERSENTASE % WARGA KAT YANG DIUSULKAN UNTUK TERDAFTAR DI DTKS

TARGET	13,12 %
REALISASI	13,12 %
CAPAIAN	100 %



PERSENTASE % WARGA KAT YANG MEMILIKI NIK

TARGET	100 %
REALISASI	100 %
CAPAIAN	100 %

SASARAN PROGRAM

03

Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi



Indikator Kinerja Program:



Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

TARGET : 60%
REALISASI : 56,05 %
CAPAIAN : 93,42 %



Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

TARGET : 50%
REALISASI : 50%
CAPAIAN : 100%

Rata-rata Capaian Sasaran Program
1 sebesar : 96,71%



Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja Program

IKP	Indikator	Capaian IKP (%)	Komponen Pembentuk	Capaian IKK (%)
IKP 3.1	Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya	93,42	IKK 4.1 Persentase (%) PM kewirausahaan PENA yang meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha.	93,42
IKP 3.2	Persentase (%) warga KAT yang meningkat kemandirian sosial ekonominya.	100	IKK 3.1 Persentase (%) yang meningkat pendapatannya secara berkelanjutan melalui pengelolaan usaha	100

Indikator Kinerja Program 3.1



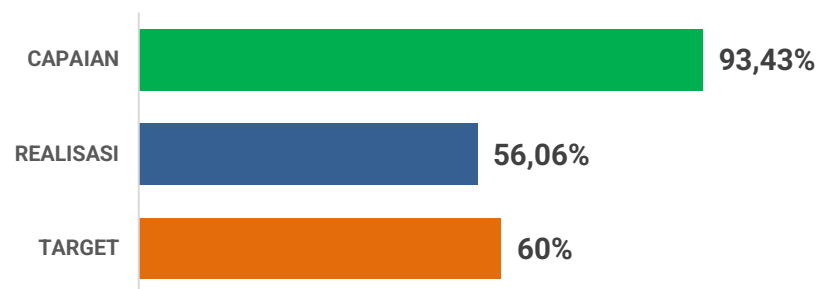
Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

Secara operasional yang dimaksud program Pahlawan Ekonomi Nusantara selanjutnya disebut PENA adalah penerapan pendekatan bisnis untuk memberikan dampak positif secara ekonomi dan sosial pada masyarakat, khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah dan yang terpinggirkan.

Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi disini paling tidak dapat dilihat dari penerima manfaat PENA telah menyatakan siap untuk lepas dari bantuan sosial dan sudah memiliki sumber pendapatan lain selain Bansos. Kemandirian pada tingkat yang lebih tinggi adalah penerima manfaat meningkat keterampilannya dalam mengelola usaha, meningkat akses pemasaran dan/atau dapat mempertahankan usaha.

Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan Kewirausahaan (PKAT-KS) menyadari bahwa pergeseran orientasi dari bantuan sosial (passive income) menjadi pemberdayaan (Active income) memerlukan berbagai upaya.

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) mengambil bagian dalam percepatan upaya-upaya tersebut. PENA menjadi program transisi yang membantu KPM bantuan sosial untuk dapat mandiri dan memiliki usaha yang berkelanjutan, sehingga dalam perkembangan usaha KPM yang sebelumnya menerima bantuan sosial dapat menjadi "Pahlawan" dalam meraih kemerdekaan ekonomi bagi dirinya dan juga orang-orang di lingkungan sekitarnya.



Capaian indikator kinerja program 3.1 Tahun 2022 sebesar 93,65%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

56,05%

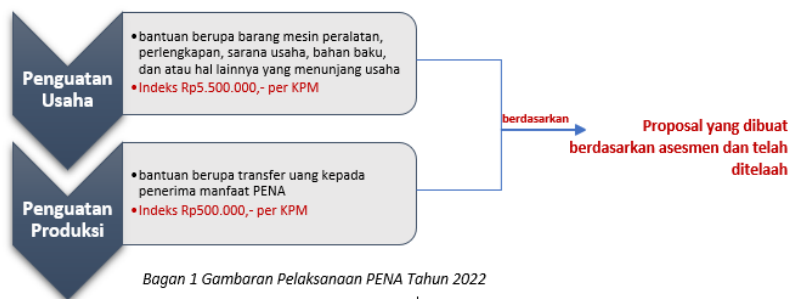
n : Jumlah penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya (4.765 KPM)

t : Jumlah Penerima manfaat Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) (5.100KPM)

Sumber data: lakin Dit KAT KS 2022

Capaian indikator kinerja 3.1 sebesar 93,43% merupakan KPM kewirausahaan social PENA sebanyak 4765 KPM yang telah mendapatkan pendampingan dari pendamping social dan telah bersedia untuk lepas dari bansos dengan menandatangani surat pernyataan untuk lepas dari bansos, KPM telah memiliki sumber pendapatan berupa usaha yang didapat dari Program Pahlawan Ekonomi Nusantara.

Kementerian Sosial melaksanakan peningkatan kemandirian sosial ekonomi penerima manfaat dengan Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA). Pahlawan Ekonomi Nusantara adalah kegiatan peningkatan kemampuan berwirausaha fakir miskin dan kelompok rentan melalui pemberian penguatan usaha dan penguatan produksi



Sesuai dengan bagan tersebut Indeks rata-rata dalam pemberian bantuan PENA per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah sebesar Rp6.000.000,-. Jenis kewirausahaan yang dijalankan oleh masing-masing KPM pun berbeda sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar KPM. Beberapa jenis usaha yang dilakukan oleh KPM sesuai dengan gambar berikut:

Makanan

Warung makan (termasuk bakso, mie, sate, nasi goreng, ayam geprek, dimsum, rujak) | Catering | Frozen Food | Cilok | Kerupuk/Keripik/Rengginang | Kue/Jajanan/ Makanan Ringan | Wating Minuman.

Kerajinan

Jahit | Anyaman | Tusuk Sate | Kotak nasi/kue | Batu bata | Genteng | Batako | Mebel kayu | Ulekan cobek

Jasa

Toko Sembako | Jual sayuran | Laundry | Barbershop | Sablon

Pertanian

Tanaman Hias | Sayur (Jamur/Seledri/Cabai) | Buah

Peternakan

Ayam | Bebek | Entok | Burung | Ikan

Pada tahun 2022, Direktorat PKAT-KS dengan Pahlawan Ekonomi Nusantara telah menyalurkan bantuan kepada 4.765 KPM dari 5.100 KPM yang tersebar di seluruh Indonesia. Realisasi capaian output tersebut berada pada persentase 93,43% dari target berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022.



Gambar 3 Proses pembelian barang penguatan usaha di Kota Kendari, Sulawesi Tengah



Gambar 4 Barang Penguatan Usaha yang akan disalurkan kepada KPM di Kab. Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang terdiri dari dua komponen, yaitu komponen penguatan usaha dan penguatan produksi pada tahun 2022 juga memiliki realisasinya masing-masing. Penguatan usaha yang terdiri dari belanja barang untuk peralatan dan bahan yang dibelanjakan secara langsung oleh pendamping sosial dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat terealisasi kepada seluruh 4.765 KPM di tahun 2022. Sedangkan untuk penguatan produksi terealisasi kepada 942 KPM sesuai dengan bagan berikut:



Bagan 1 Penyaluran Penguatan Usaha dan Penguatan Produksi PENA Tahun 2022

Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) pada tahun 2022 juga telah disalurkan di 26 Provinsi dan 145 Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan gambar berikut:



Gambar 5 Wilayah Salur Pahlawan Ekonomi Nusantara Tahun 2022



PENA untuk Kelompok Petani Garam Sarining Segara di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali

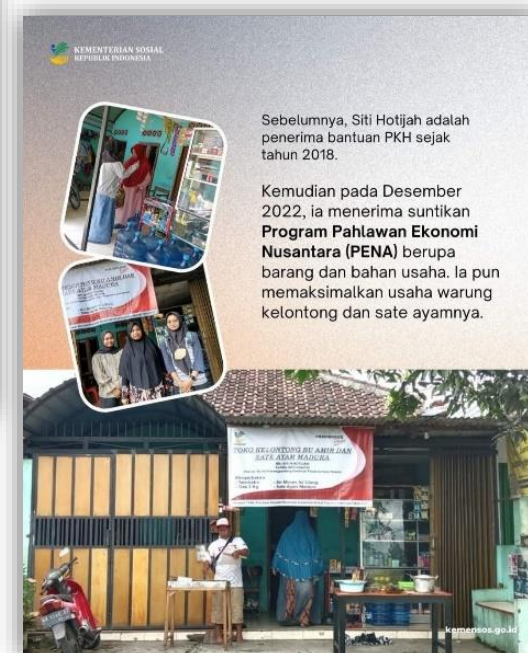


Ni Nengah Suyasa, Penerima PENA untuk mendukung usaha sarana upakara "Biasanya saya sehari hanya dapat Rp30.000,- Setelah saya mendapatkan bantuan (PENA), sehari saya bisa dapat Rp75.000,- kalau ada upacara bisa dapat Rp100.000,-."



Sumber :
<https://www.facebook.com/kemsosRI>

*Cerita Ibu Siti Hotijah (42)
Kabupaten Bantul Yogyakarta,
dulunya penerima Program
Keluarga harapan.
Mantap mengundurkan diri,
Mantap menerima Program PENA*



Indikator Kinerja Program 3.2



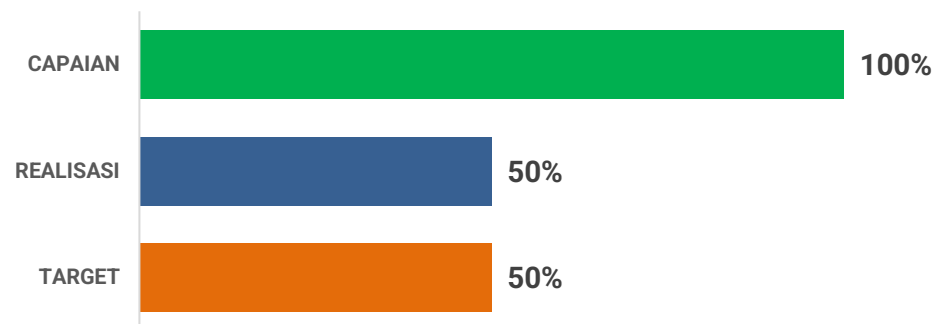
Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

Secara operasional yang dimaksud warga KAT adalah anggota KAT yang terdiri dari individu, keluarga, dan kelompok yang hidup bersama dan saling berinteraksi sebagai satu kesatuan komunitas di lokasi KAT.

Warga KAT yang meningkat kemandirian sosial ekonominya dilihat dari peningkatan kemampuan, keterampilan atau penghasilan melalui pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, atau akses pekerjaan.

Meningkatkan kemandirian sosial ekonomi dilaksanakan melalui bantuan penghidupan berkelanjutan, fokusnya pada mata pencarian alternatif bagi warga. Dikarenakan daya dukung alam sudah berkurang karena adanya degradasi lingkungan. Oleh karena mereka didorong untuk mempunyai mata pencarian alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka yang berbasis pada kelompok. Di warga KAT kebanyakan kolektif, bantuan yang diberikan bersifat bantuan kelompok

Pemberian bantuan tersebut diberikan kepada kelompok - kelompok warga pada lokasi pemberdayaan tahun II, lokasi kedaruratan dan wilayah 3 T (terdepan, terpencil dan tertinggal) lainnya melalui swadaya dan gotong royong dengan besaran bantuan sebesar Rp25.000.000,- /kelompok..



Capaian indikator kinerja program 3.1 Tahun 2022 sebesar 200%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

50%

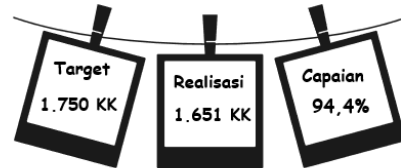
n : Jumlah Warga KAT yang meningkat kemandirian sosial ekonominya

t : Jumlah warga KAT yang mendapatkan program pemberdayaa

kemandirian sosial ekonomi dilihat dari peningkatan kemampuan, keterampilan atau penghasilan melalui pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, atau akses pekerjaan setelah menerima program pemberdayaan bantuan stimulan berkelanjutan

Capaian kinerja meningkatnya kemandirian sosial ekonomi warga Komunitas Adat terpencil (KAT) sebesar 100% ini diperoleh dari pemberian bantuan penghidupan berkelanjutan melalui kelompok warga dengan Target sebanyak 1748 KK yang merupakan jumlah 50% dari 3500 KK warga KAT, pemberian bantuan penghidupan berkelanjutan ini diberikan kepada 42 kelompok wasyarakat yang mewakili dari jumlah 3500 KK warga KAT, yang artinya realisasi target 100%.

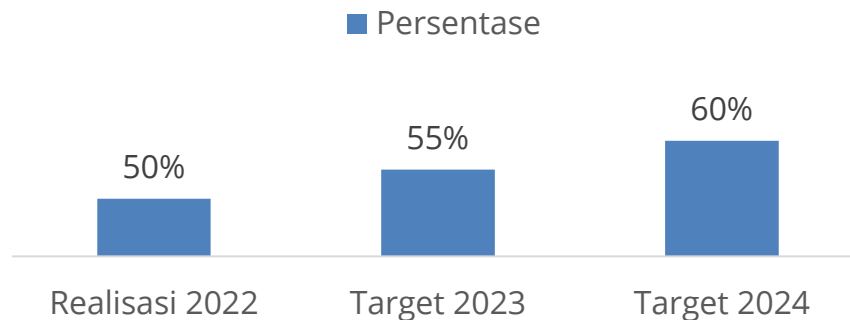
Bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan digunakan untuk mengatasi hambatan keterbatasan modal dan keterampilan usaha serta dapat menjadi sumber mata pencarian alternatif bagi warga KAT. Bantuan tersebut diberikan kepada kelompok warga di lokasi pemberdayaan tahun II. Bantuan stimulan penghidupan berkelanjutan diberikan kepada 37 Kelompok PKAT



Bantuan Stimulan Penghidupan berkelanjutan telah disalurkan kepada 37 Kelompok KAT di lokasi pemberdayaan tahun ke II dengan jumlah warga yang diberdayakan sebanyak 1.651 Keluarga dengan capaian sebesar 94,4%.

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 3.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 60%, artinya realisasi tahun 2022 masih belum mencapai target 2024 persentasenya disbanding target jangka menengah baru mencapai 83,33%.



Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Komunitas dengan indikator program Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkat kemandirian sosial ekonominya tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, karena ditahun sebelumnya tidak ada indikator meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial, adapun indikator untuk pemberdayaan KAT ditahun 2021 adalah seperti gambar dibawah ini :





Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan ketel pengolahan kayu putih di Kampung Ngade, Kabupaten Buru



Bantuan Stimulan Penghidupan Berkelanjutan mesin perontok jagung di Dusun Biru, Kabupaten Polman -Sulbar



Usaha konveksi warga KAT di Kampung Seunong Bakti, Kab. Aceh Jaya, Aceh

Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja

Dinas Sosial Kabupaten berperan penting dalam pengawalan dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan KAT, khususnya pada tataran pelaksanaan penyaluran bantuan sosial di masing-masing lokasi serta memastikan bantuan sosial diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh warga KAT untuk pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kapasitas dan kemandirian.

Dinas Sosial juga berperan penting dalam menjaring sinergi dan kerjasama lintas sektor khususnya program/kegiatan lintas OPD lingkup Kabupaten. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai mitra pendampingan pemberdayaan KAT sebagai garda terdepan pendampingan dan pengawalan penyaluran dan pemanfaatan bantuan sosial oleh warga KAT di Lokasi. LKS ini pula yang menjajid mata dan telinga untuk menyerap aspirasi, permasalahan, serta sebagai aktivitas/kegiatan pendampingan lainnya serta terutama dalam pengawalan penyaluran bantuan sosial mulai dari tahap persiapan (penyusunan KAK, RAB, pembuatan rekening, dll), pelaksanaan penyaluran sampai dengan dokumentasi dan pertanggungjawaban.

Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja pemberdayaan KAT khususnya terkait dengan penyaluran Bantuan Sosial telah menysasar kepada 3.500 target Keluarga KAT yang diberdayakan pada tahun 2022 atau mencapai target 100%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bantuan sosial pemberdayaan KAT melalui mekanisme cash transfer ke rekening pokmas untuk kemudian dilakukan transfer dan pembelanjaan di toko penyedia berikut penyaluran ke warga telah terlaksana di seluruh lokasi pemberdayaan KAT.

Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial dengan mekanisme cash transfer meningkat seiring meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan sosial pemberdayaan KAT.

Untuk melihat sejauhmana outcome dari bantuan sosial yang telah diberikan tersebut khususnya untuk mencapai sasaran program yang telah ditetapkan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi lanjutan serta survei/kajian atas pencapaian hasil program pemberdayaan khususnya bantuan sosial yang telah disalurkan. Hal ini dilakukan agar bantuan sosial tidak hanya pada tataran penyaluran (output) tetapi harus juga pada tataran pemanfaatan (outcome) dan tataran dampak (impact) dari bantuan sosial terhadap penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sumberdaya yang digunakan dalam pemberdayaan KAT terdiri atas anggaran dan sumberdaya manusia pelaksana pemberdayaan baik di pusat dan daerah. Perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial dari menggunakan pihak penyedia menjadi cash transfer ke rekening pokmas telah meningkatkan kecepatan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sekaligus efektifitas dan efisiensinya.

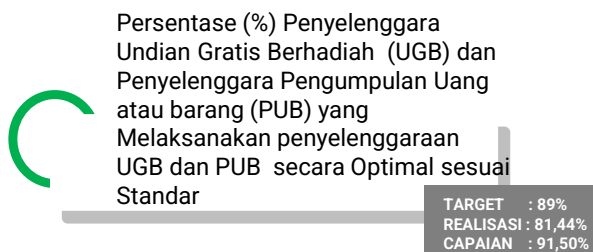
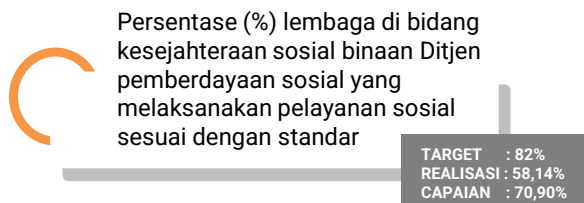
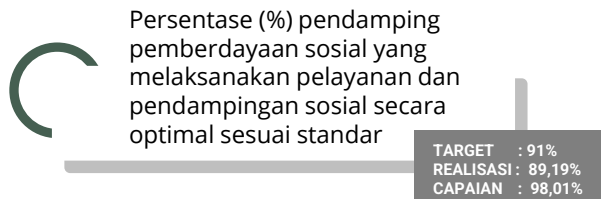
Peran penanggungjawab (Person in charge) pusat pada masing-masing lokasi untuk pendampingan dan pengawalan dilaksanakan mulai dari tahap administratif sampai dengan pertanggungjawaban sangat membantu dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial pemberdayaan KAT.

SASARAN PROGRAM

04

Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Program:



Rata-rata Capaian Sasaran Program
sebesar : **86,80%**



Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja Program

IKP	Indikator	Capaian IKP (%)		Komponen Pembentuk	Capaian IKK (%)
IKP 4.1	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar.	98,01	IKK 1.1	Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar.	98,01
IKP 4.2	Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	70,9	IKK 2.1	Persentase (%) badan usaha yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.	96,15
			IKK 2.2	Persentase (%) lembaga dibidang Kesos (LK3, LKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan Kesos	104,17
IKP 4.3	Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	91,50	IKK 1.2	Persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB.	101,25

Indikator Kinerja Program 4.1

Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar

Secara operasional yang dimaksud Pendamping Dayasos adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan di bidang pemberdayaan sosial

Pelayanan dan Pendampingan Sosial yang dimaksud adalah kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang pemberdayaan sosial

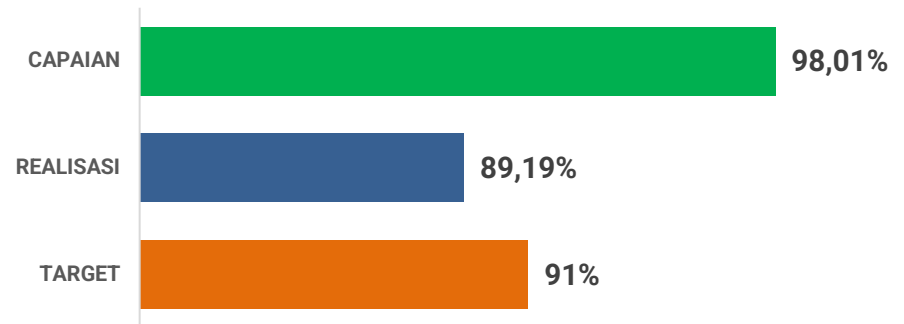
Yang dimaksud melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar adalah melaksanakan pelayanan pelayanan pendampingan sosial sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis program pemberdayaan sosial, serta mendapatkan peningkatan kapasitas melalui diklat atau bintek.

Sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang meliputi Pekerja Sosial, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial yang melaksanakan pelayanan pendampingan di bidang

7.230 orang
Tenaga
Kesejahteraan Sosial
Kecamatan

100 orang
Pekerja Sosial

3.000 orang
Pekerja Sosial
Masyarakat



Capaian kinerja indikator 4.1 Tahun 2022 sebesar 98,01%.

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

89,19%

n : Jumlah pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar (330 orang)

t : Jumlah sampel pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan pemberdayaan sosial (370 orang)

Sumber data survey Dit. Dayamas

Capaian pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal mencapai 98,01% hal ini diperoleh dari hasil monitoring dengan melaksanakan survey terhadap responden tenaga pendamping pemberdayaan sosial. Survey dilakukan terhadap 370 responden pendamping sosial dengan hasil menunjukkan 330 pendamping pemberdayaan sosial telah melaksanakan pelayanan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar, data tersebut menunjukkan realisasi sebesar 89,19%.



Peningkatan Kapasitas terhadap Pendamping Sosial yang dilakukan di tahun 2022

TKSK

- ✓ Koordinasi dan Konsultasi
- ✓ FGD di 2 titik
- ✓ Workshop penguatan peran dan fungsi TKSK
- ✓ Peningkatan kapasitas TKSK

PEKSOS

- ✓ Pelaksanaan Sinergitas
- ✓ FGD
- ✓ BinteK secara luring dan daring

PSM

- ✓ Pelaksanaan Sinergitas
- ✓ FGD
- ✓ BinteK secara luring dan daring

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

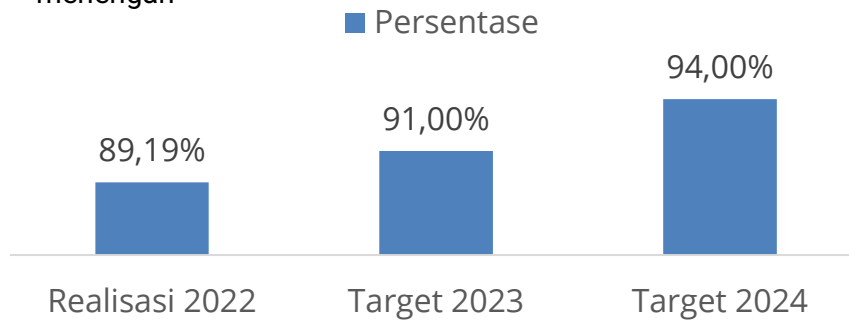
Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak bisa melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 belum ada sasaran program meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja program Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar

Kendala tidak tercapainya realisasi kinerja

- ✓ Adanya realokasi anggaran menjadi tali asih TKSK sebesar Rp. 580.000.000,-
- ✓ Pembatasan pertemuan dalam skala besar
- ✓ Jangkauan PSKS ke seluruh wilayah Indonesia masih sering terkendala oleh keterbatasan sinyal internet

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 4.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 94%, artinya realisasi tahun 2022 belum memenuhi target 2024 persentase capaiannya 94,88%. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mendorong pencapaian target jangka menengah



Beberapa dokumentasi aktivitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial



Indikator Kinerja Program 4.2

Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar

Secara operasional yang dimaksud Lembaga di Bidang Kesos yang diberdayakan dan melaksanakan pelayanan sosial adalah Karang Taruna, badan Usaha (BU), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3) yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar

Standar yang dimaksud adalah sesuai dengan standar lembaga/ sesuai pedoman/standar akreditasi/ standar pelayanan lembaga.

Lembaga di bidang Kesos binaan pemberdayaan sosial terdiri :

- ✓ LK3
- ✓ LKS
- ✓ Badan Usaha



Capaian kinerja indikator 4.2 Tahun 2022 sebesar 70,90%.

Capaian Indikator 4.2 diperoleh dari hasil survey yang dilakukan terhadap Lembaga Bidang Kesos yang dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Usaha

- ✓ Responden badan usaha yang diberdayakan sebanyak 52 responden.
- ✓ Responden Lembaga bidang kesos sebanyak 120 responden

BADAN USAHA

58,14%

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

n : Jumlah badan usaha yang melaksanakan yang melaksanakan pelayanan sosial optimal sesuai standar (25 badan usaha) ditambah Jumlah Lembaga di bidang kesos yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar (75 Lembaga)

t : Jumlah sampel badan usaha yang diberdayakan di tahun berjalan (52 badan usaha) ditambah Jumlah sampel Lembaga bidang kesos yang diberdayakan di tahun berjalan (120 Lembaga)

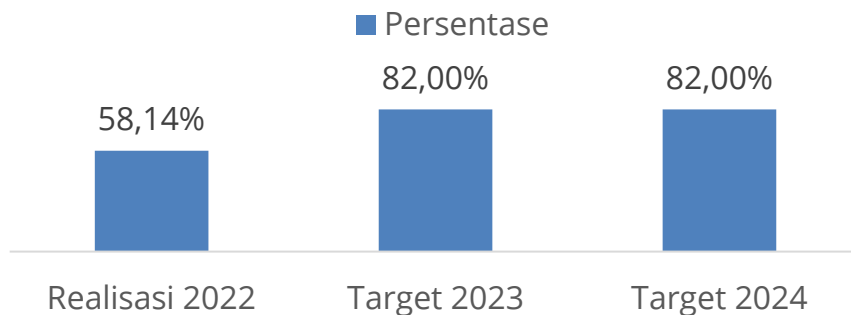
Sumber data survey Dit. Dayamas

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya tidak bisa melakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2021 belum ada sasaran program Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial dengan indikator kinerja program Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar.

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi indikator kinerja 4.3 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 82%, artinya realisasi tahun 2022 belum memenuhi target 2024 prosentase capaiannya hanya 70,90% dari target jangka menengah



Analisa Penyebab tidak tercapainya target kinerja

- ✓ Kurang tersedianya data dan informasi mengenai jumlah PSKS Lembaga
- ✓ Belum optimalnya koordinasi, sinergitas dan konsolidasi dengan PSKS Lembaga

Strategi

- ✓ Optimalisasi koordinasi, sinergitas dan konsolidasi dengan pemerintah daerah, pengurus nasional, dunia usaha dan stakeholder lainnya
- ✓ Menyediakan data dan informasi terbaru mengenai jumlah PSKS lembag (BNBA)



Indikator Kinerja Program 4.3

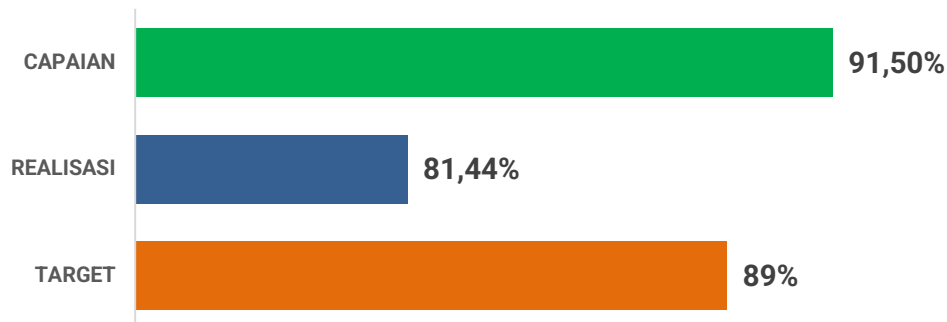


Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar

Undian Gratis Berhadiah (UGB) adalah tiap-tiap kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara undi atau cara lain

Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan

Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar yaitu penyelenggaraan yang dilaksanakan sesuai peraturan atau pedoman yang berlaku, dengan kriteria pelaksanaan dilakukan setelah mendapatkan izin dan melaporkan kegiatan penyelenggaraannya.



Capaian kinerja indikator 4.3 Tahun 2022 sebesar 91,50%.

Perhitungan

IKK 1.3

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

81,44%

n : Jumlah penyelenggara UGB dan PUB yang berizin dan melaporkan penyelenggaraan UGB dan PUB.(873 Penyelenggara)

t : Jumlah Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang berizin (1072 Penyelenggara)



Capaian realisasi 91,50% indikator Kinerja Program 4.3 merupakan persentase capaian penyelenggara UGB dan PUB yang melakukan penyelenggaraan UGB dan PUB dan melaporkan penyelenggaraannya sebanyak 873 penyelenggara, per izin untuk penyelenggaraan di tahun 2022 baik UGB maupun PUB adalah sejumlah 1072 .

Data Penyelenggara UGB dan PUB tahun 2022

No	Penyelenggara	Izin	Melaporkan
1	UGB	911	776
2	PUB	161	99
Jumlah		1072	873

Sumber : Dit PSDS

Kontribusi

Kontribusi penyelenggara UGB untuk penyelenggaraan Kesos berupa dana **hibah langsung dalam negeri** dalam bentuk uang sebesar Rp. 131.021.067.341 telah disalurkan untuk korban bencana, Sembako, Modal Usaha, sarana prasarana, santunan, pengobatan, pertanian, kewirausahaan, RTLH, Fasilitas sosial, pemenuhan kebutuhan hidup, sarana transportasi, pemukiman warga.

Kontribusi lainnya dari penyelenggaraan UGB adalah **penerimaan negara bukan pajak** sebesar Rp. 628.289.225,- diperoleh dari biaya izin promosi dan biaya izin penyelenggaraan UGB.



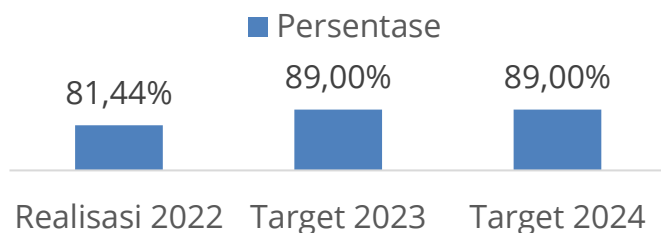
Penyaluran bantuan yang bersumber dari kontribusi Penyelenggaraan UGB di Sibolangit Deli Serdang untuk Korban Bencana sebesar Rp. 2.295.000.000

Sumber : Dit PSDS

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya untuk indikator persentase (%) penyelenggara UGB dan PUB yang bersinergi dengan Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dalam hal ini tidak bisa dibandingkan dengan indikator kinerja program tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya tidak ada indikator kinerja program yang sama

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah



Realisasi indikator kinerja 4.2 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 89%, artinya realisasi tahun 2022 belum memenuhi target 2024 prosentase capaiannya hanya 91,50%. Ditjen Pemberdayaan Sosial akan mendorong pencapaian target jangka menengah.

- ✓ Melakukan pemantauan dan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan UGB untuk meningkatkan potensi sumber pendapatan baik untuk dana PNBP maupun dana hibah;
- ✓ Penguatan Kapasitas Pegawai petugas ;
- ✓ Memperkuat sinergi antar Satuan Kerja di Kementerian Sosial, antar Kementerian/Lembaga, dan dengan Dinas Sosial di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- ✓ Pengembangan Aplikasi simppsdb.kemsos.go.id serta penguatan database



SASARAN PROGRAM

05

Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial

Indikator Kinerja Program:

Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar

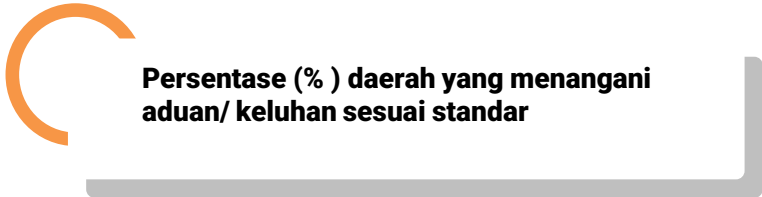
TARGET : 74%
REALISASI : 83,66%
CAPAIAN : 113,05%



Penghitungan Realisasi Indikator Kinerja Program

IKP	Indikator	Capaian IKP (%)		Komponen Pembentuk	Capaian IKK (%)
IKP 5.1	Persentase (%) Daerah yang menangani aduan/keluhan sesuai standar.	113,05	IKK 4.1	Persentase (%) kab/kota yang melaksanakan layanan dan aduan/keluhan sesuai standar	113,05

Indikator Kinerja Program 5.1



Secara operasional yang dimaksud Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten/Kota

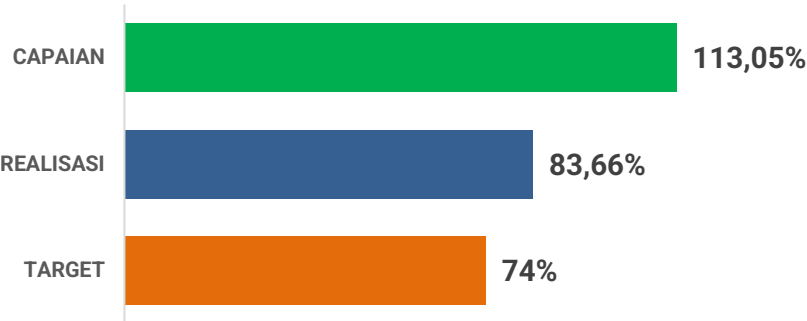
Daerah yang menangani aduan/keluhan sesuai standar adalah daerah yang sudah memiliki Puskesmas Kabupaten/Kota dan/atau Desa/Kelurahan, dan menangani aduan/keluhan sesuai standar layanan Puskesmas

Sesuai standar adalah pelaksanaan layanan sesuai pedoman umum pelaksanaan sistem layanan dan rujukan terpadu

Puskesmas adalah Lembaga yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan akses dan menjangkau layanan perlindungan socrs dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan lembaga non-pemerintah.

Puskesmas juga sebagai pusat aduan layanan sosia, Sehingga lebih responsive dan tepat sasaran. Puskesmas menjalankan fungsi Sistem layanan dan rujukan Terpadu (SLRT)

- Mengintegrasikan informasi, data dan layanan,
- Mengidentifikasi dan menangani keluhan serta melakukan rujukan.
- Mencatatat kepesertaan dan kebutuhan program
- Mendukung penerapan SPM bidang sosial
- Membantu verivali DTKS melalui SIKS-NG



Capaian kinerja indikator 5.1 Tahun 2022 sebesar 1113,05%.

Perhitungan

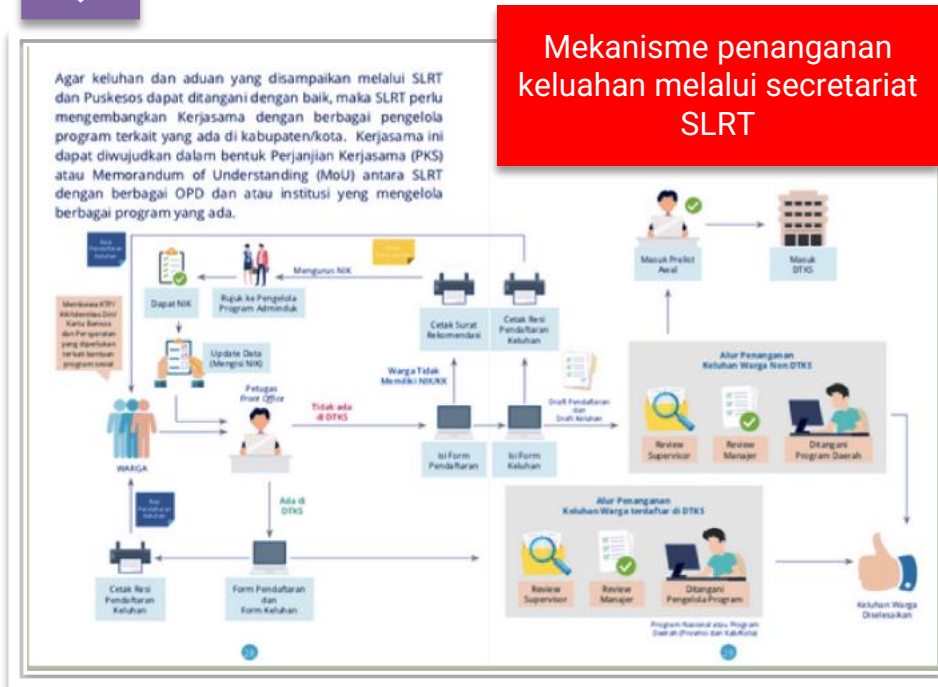
$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

83,66%

- n : Jumlah Kab/Kota yang menangani aduan/keluhan melalui Puskesmas sesuai standar di tahun berjalan (430 Kab/Kota)
- t : Jumlah kab/Kota seluruh Indonesia (514 Kab/Kota)

Sumber Data : data base pilar-pilar sosial Direktorat Pemberdayaan Sosial
Hasil monitoring dan evaluasi

Realisasi capaian diperoleh dari perhitungan jumlah kabupaten/kota yang menangani keluhan/aduan pelalui puskesmas sesuai standar sebanyak 430 kab/kota ditambah desa/kelurahan yang menangani aduan/keluhan melalui Puskesmas sesuai standar sebanyak 728 Desa/kelurahan dibagi jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia sebanyak 514 kab/kota ditambah jumlah desa/kelurahan yang memiliki puskesmas dikali seratus persen.



SLRT adalah system layanan yang digunakan dalam Puskesmas untuk embantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, lalu menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa/Kelurahan) dan non-pemerintah.



Puskesmas juga menjadi wadah mewujudkan adanya sinergi berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal

Puskesmas-SLRT telah berkembang

150 Kab/Kota	(2016 - 2019)
280 Kab/Kota	2021

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

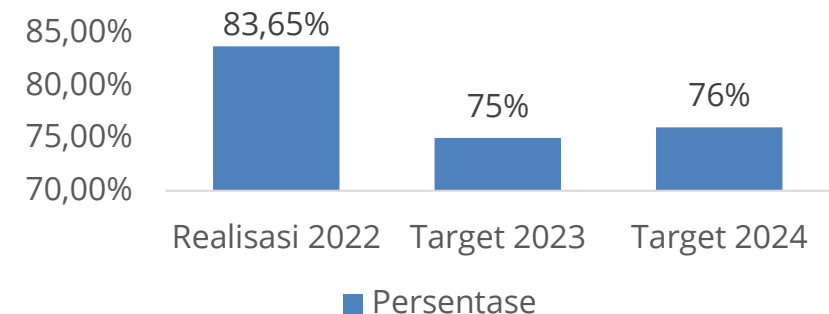


Keterangan :

- ✓ Tahun 2020 tidak ada pertumbuhan /pembentukan untuk SLRT dan Puskesmas disebabkan adanya pandemic Covid.19
- ✓ Tahun 2022 tidak dilakukan pembentukan 84 SLRT disebabkan adanya perubahan kebijakan internal Kemensos
- ✓ Total jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berjumlah 514 kabupaten/kota sampai 2022 sudah dikembangkan SLRT sebanyak 430 Kab/Kota, sisa 84 Kab/Kota yang belum membentuk SLRT

Berdasarkan grafik diatas diketahui tend peningkatan pertumbuhan/pembentukan SLRT di Kab/Kota setiap tahunnya, kecenderungan kenaikan ini disebabkan oleh semakin meningkatnya kesadaran dan dukungan pemerintah daerah terhadap keberadaan SLRT dalam melayani masyarakat miskin dan rentan di daerahnya masing-masing. Dukungan pemerintah daerah mulai dari gubernur, bupati, walikota diberikan berupa adanya peraturan Daerah/Perda dan dukungan anggaran dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial satu atap melalui SLRT di tingkat Kab/Kota

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah



Realisasi indikator kinerja 5.1 dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 76%, artinya realisasi tahun 2022 telah melampaui target 2024 prosentase realisasi 83,65% artinya dibanding target jangka menengah capaiannya sebesar 110,65%.

Ditjen Pemberdayaan Sosial akan terus berusaha untuk mendorong Kab/Kota seluruh Indonesia agar bisa mengembangkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui layanan Puskesmas/SLRT semaksimal mungkin, dan ***tetap mengupayakan agar menjadikan Puskesmas/SLRT menjadi wadah mewujudkan sinergi berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di lingkungan local.***

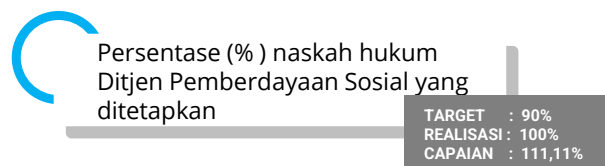
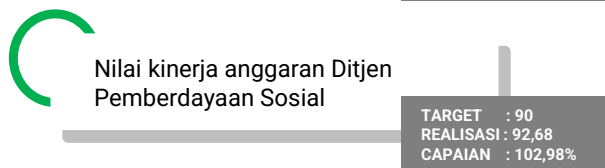
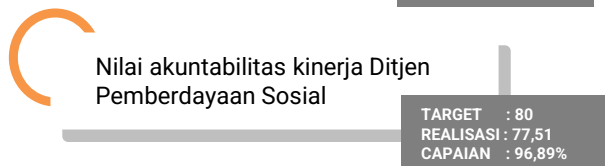
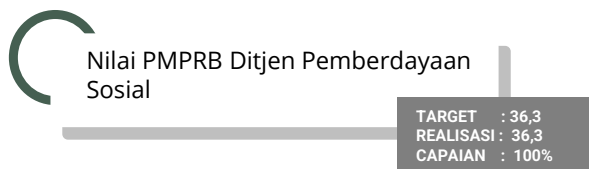
SASARAN PROGRAM

06

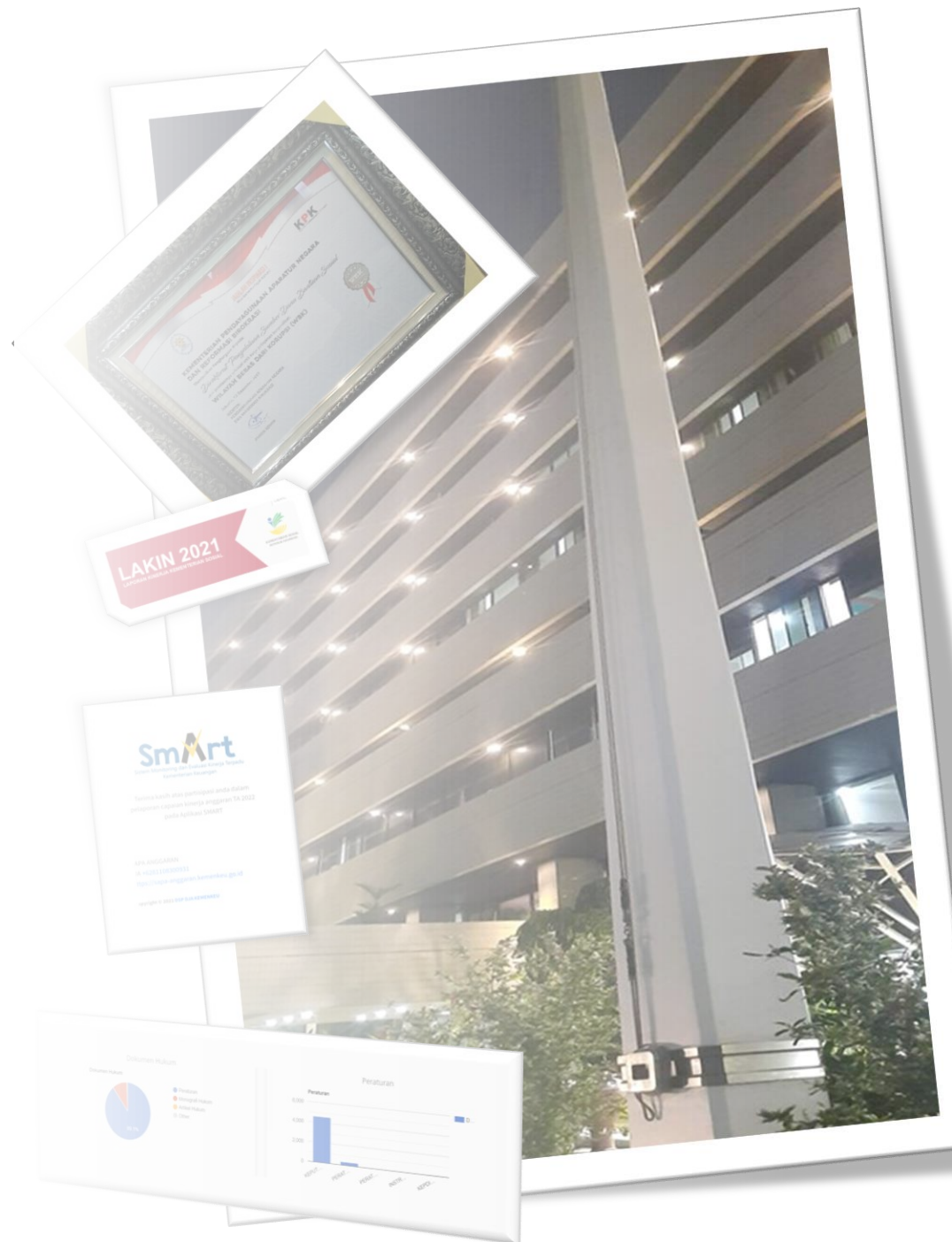
**Terwujudnya tata kelola
Kementerian Sosial yang
berkualitas**



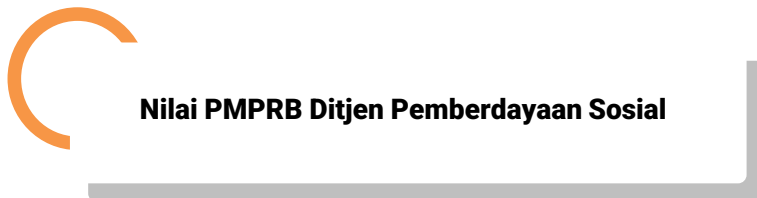
Indikator Kinerja Program:



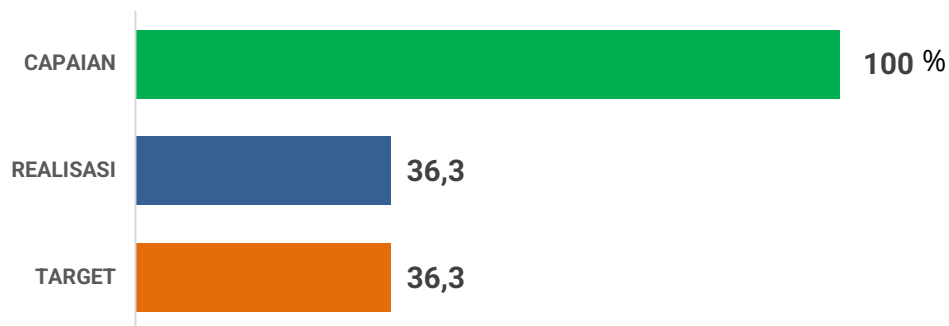
**Rata-rata Capaian Sasaran
Program 1 sebesar : 102,74%**



Indikator Kinerja Program 6.1



Nilai PMPRB adalah nilai yang diperoleh dari penilaian mandiri unit kerja melalui aplikasi pmprb.menpan.go.id atas upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance.



Capaian kinerja indikator 6.1 Tahun 2022 sebesar 100%.

Perhitungan

Penilaian Mandiri PRB Ditjen Dayasos

36,3

Capaian indikator kinerja PMRB yang digunakan adalah capaian tahun sebelumnya (tahun 2021) dikarenakan nilai PMRB tahun 2022 masih dalam proses penilaian. PMRB 2021 mendapatkan nilai 36,3 dengan capaian kinerja 100% dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja tahun sebelumnya

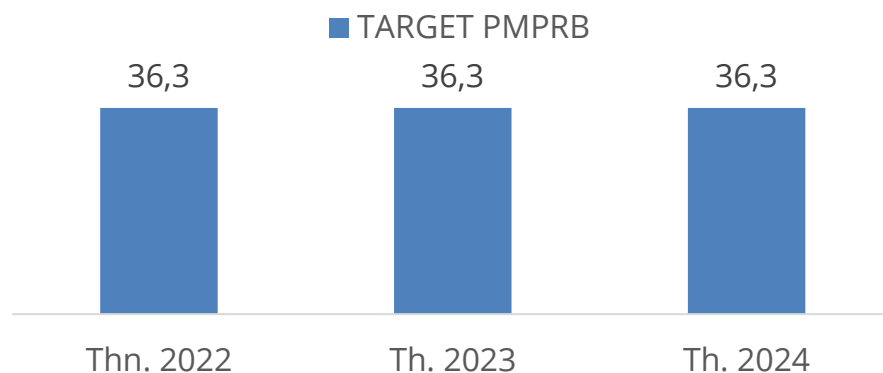


Dibandingkan dengan Nilai PMRB tahun sebelumnya terdapat peningkatan dengan capaiannya 111,35%

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan target jangka menengah sebesar 100%.

Target 2024 sudah tercapai, Ditjen Pemberdayaan Sosial akan terus meningkatkan implementasi RB lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.



Realisasi pada indikator kinerja 6.1 didukung oleh capaian kegiatan yaitu terbentuknya manajemen perubahan, penguatan organisasi, penguatan tata laksana, peningkatan pelayanan publik, simplifikasi peraturan, harmonisasi peraturan, tersusunnya produk hukum, pelaksanaan publikasi, dan pengendalian opini publik.

Faktor Pendukung

- ✓ Reviu SOP atas kegiatan yang mengalami perubahan mendasar antara lain SOP terkait Puskesmas-SLRT dan SOP terkait Perizinan UGB/PUB. Penyusunan
- ✓ Road Map RB Dayasos untuk meningkatkan implementasi RB di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial. Penyusunan Road Map RB melibatkan perwakilan dari masing-masing unit Eselon II lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.

Rencana Peningkatan Nilai PMRB

- ✓ Pembahasan Reformasi Birokrasi Ditjen Dayasos
- ✓ Penguatan Agen Perubahan di lingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial
- ✓ Koordinasi dan Konsultasi Evaluasi Kelembagaan

Indikator Kinerja Program 6.2



Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen PEMBERDAYAAN SOSIAL

Nilai SAKIP adalah nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial. Unsur-unsur penilaiannya meliputi: Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Kinerja (10%) dan Pencapaian Kinerja (20%).



Capaian kinerja indikator 6.2 Tahun 2022 sebesar 96,89%.

Perhitungan

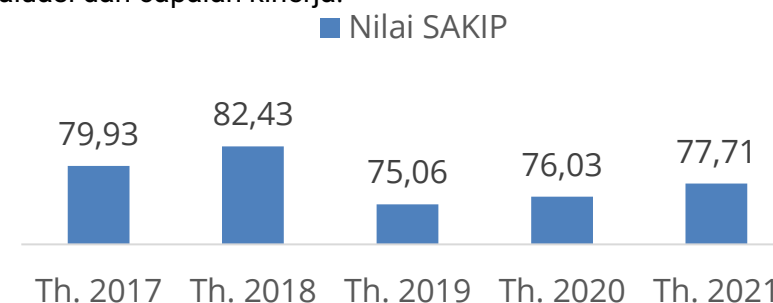
Nilai evaluasi AKIP Ditjen Dayasos oleh Itjen

77,51%

Ditjen Pemberdayaan Sosial memperoleh skor evaluasi SAKIP dengan nilai 77,71 (kategori BB) dengan interpretasi **Sangat Baik** Akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, capaian kinerja 96,89%.

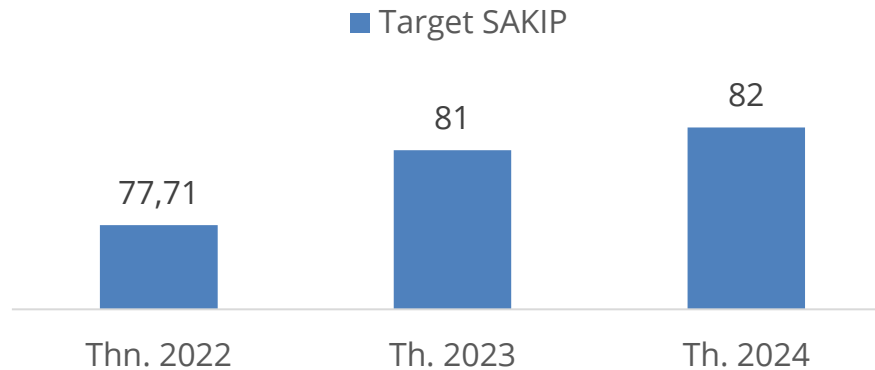
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Nilai SAKIP 2021 meningkat dari nilai SAKIP tahun 2020. Hal ini karena terdapat peningkatan pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi dan capaian kinerja.

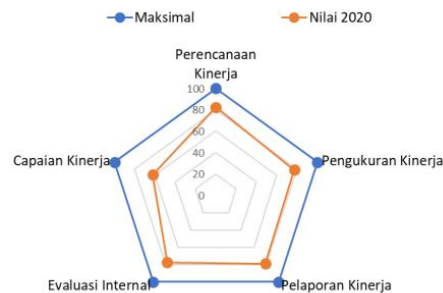


Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan target nilai jangka menengah sebesar 82. Target 2024 masih belum tercapai dengan persentase capaian baru 94,76%, sehingga Ditjen Pemberdayaan Sosial akan terus meningkatkan implementasi SAKIP lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.



Nilai SAKIP per Unsur Penilaian 3 unsur penyumbang terbesar nilai SAKIP Ditjen Dayasos 2020 adalah unsur perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Perencanaan meliputi rencana strategis dan rencana kinerja tahunan. Pelaporan Kinerja meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja. Evaluasi Internal meliputi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan evaluasi.



Faktor Pendukung

- ✓ Penyusunan Manual IKU Ditjen Pemberdayaan Sosial.
- ✓ Buku Manual IKU memberikan informasi sasaran dan indikator kinerja program, sasaran dan indikator kinerja kegiatan, serta penjelasan formulasi atau rumusan untuk menghitung capaian kinerja di lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial.
- ✓ Penyusunan LKj setiap Triwulan untuk mengetahui progres pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja tiap triwulan
- ✓ Koordinasi dan konsultasi SAKIP lingkup Ditjen Dayasos dengan perwakilan masing-masing unit eselon II lingkup Ditjen Pemberdayaan Sosial, Biro Perencanaan, Inspektorat Jenderal dan Kementerian PAN RB. Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial

Rencana Peningkatan Nilai SAKIP Reviu Renstra Ditjen Pemberdayaan Sosial 2020-2024.

- ✓ Reviu Indikator Kinerja Pemberdayaan Sosial berdasarkan Laporan Kinerja 2021
- ✓ Menyusun Rencana Aksi Tahun berikutnya dan Monitoring Rencana Aksi secara berkala Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Sosial

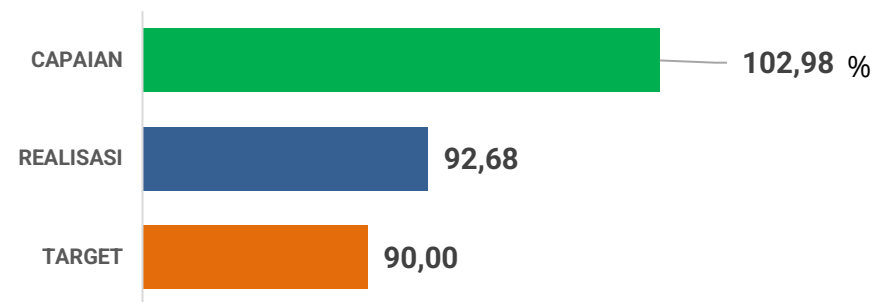
Indikator Kinerja Program 6.3



Nilai kinerja anggaran adalah penggabungan dari nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen. (PMK No 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi atas Kinerja Anggaran K/L)

Nilai SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) adalah Nilai untuk Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) yang meliputi 3 (tiga) Aspek pengukuran yaitu Aspek Manfaat, Aspek Implementasi dan Aspek Konteks yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan kemenkeu untuk mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian/ Lembaga. Nilai IKPA meliputi 4 Aspek dan 13 Indikator. Aspek yang menjadi pengukuran IKPA yaitu Kesesuaian terhadap perencanaan dan pelaksanaan anggaran, Efektifitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran dan Kepatuhan terhadap regulasi.



Capaian kinerja indikator 6.3 Tahun 2022 sebesar 98,00%.

Perhitungan

nilai SMART dengan bobot 60 persen dan nilai IKPA dengan bobot 40 persen ($60\% \times 93$) + ($40\% \times 91,50$)

92,68

Nilai smart 60% ditambah kali nilai IKPA 40%.
($60\% \times 93,46 + 40\% \times 91,50$)

Tahun 2022, Nilai SMART Ditjen Pemberdayaan Sosial 93,46 sedangkan nilai IKPA

Ditjen Pemberdayaan Sosial 91,50. Penggabungan kedua nilai tersebut menghasilkan

Nilai Kinerja Anggaran 88,42. Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,24%.

Realisasi telah melebihi target yang telah ditetapkan.

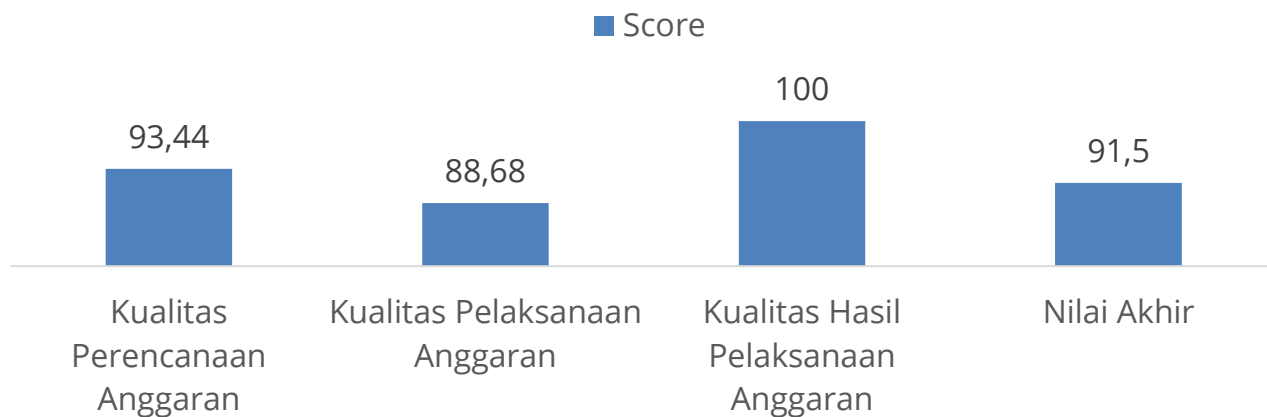


INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	182	027	690556	DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL	Nilai	100.00	86.87	82.24	83.06	98.63	84.48	95.00	100.00	91.50	100%	91.50
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.69	16.45	8.31	9.86	8.45	4.75	25.00			
					Nilai Aspek	93.44		88.68					100.00			
Disclaimer: Sesuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022 , indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022																

Indikator pelaksanaan Anggaran Ditjen Dayasos



Indikator Kinerja Program 6.4



Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan

Naskah hukum yang dimaksud adalah naskah hukum yang menjadi kewenangan UKE I, ditetapkan oleh masing-masing pimpinan UKE I (hanya yg ditandatangani oleh pimpinan UKE I)



Capaian kinerja indikator 6.4 Tahun 2022 sebesar 100%.

Capaian persentase naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial tahun 2022 yang ditetapkan adalah 100%, target surat keputusan Direktorat jenderal pemberdayaan sosial sebanyak 80 Surat Keputusan dengan capaian SK Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan sebanyak 80 Surat Keputusan

Perhitungan

$$\text{Persentase} = \frac{n}{t} \times 100\%$$

100%

n : Jumlah naskah hukum yang ditetapkan Ditjen Pemberdayaan Sosial
 t : Jumlah naskah hukum Ditjen pemberdayaan sosial yang diajukan

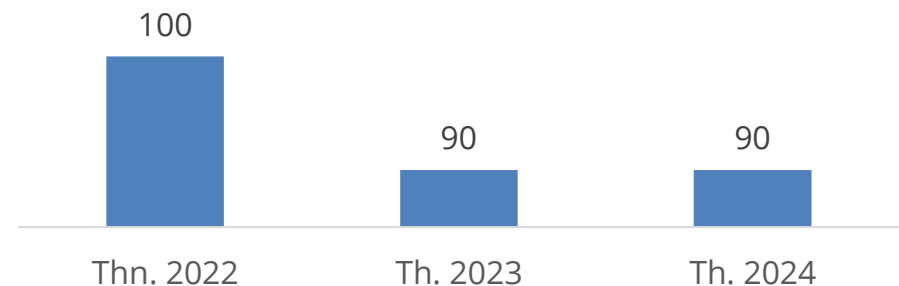
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya

Capaian kinerja belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun Sebelumnya . Hal ini dikarenakan indikator kinerja ini baru terdapat di tahun 2022

Realisasi Kinerja dengan target jangka menengah

Realisasi tahun 2022 jika dibandingkan target jangka menengah capainnya sebesar **111,11%**. Target 2024 sudah melebihi target capaian di tahun 2024, dalam hal ini Ditjen Pemberdayaan Sosial akan terus meningkatkan kinerja dalam penetapan naskah hukum.

■ NASKAH HUKUM



SASARAN PROGRAM

07

Meningkatnya kepuasan stakeholder terhadap layanan Kementerian Sosial



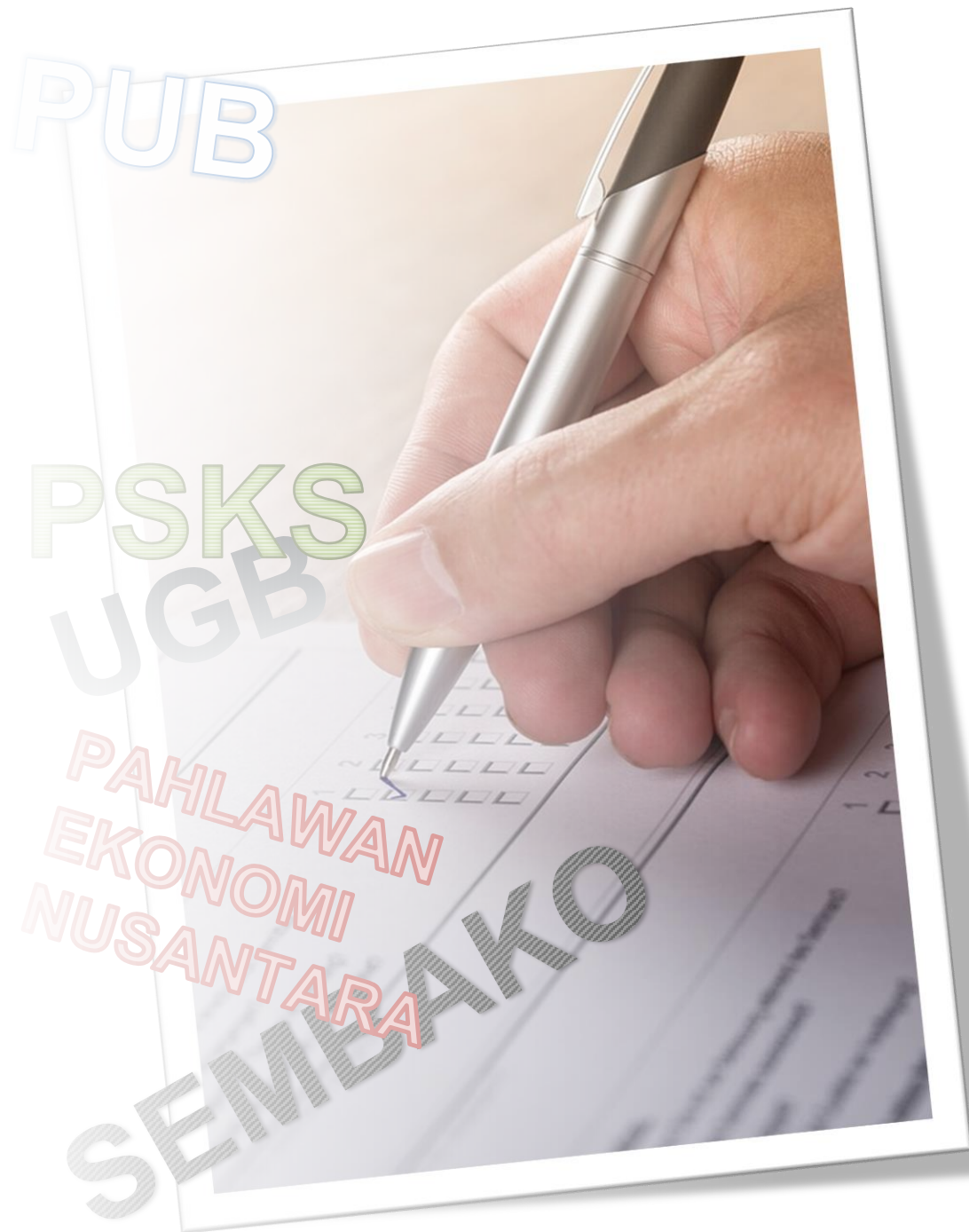
Indikator Kinerja Program:



Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

TARGET : 90
REALISASI : 91,05
CAPAIAN : 101,17%

**Capaian Sasaran Program 7
sebesar : 101,17%**



Indikator Kinerja Program 7.1



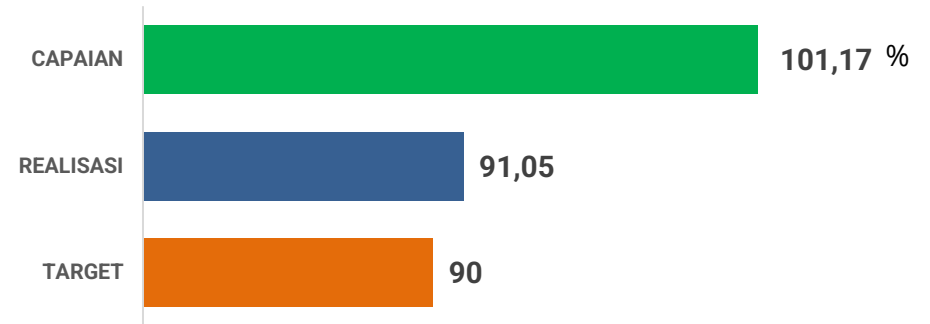
Nilai kepuasan stakeholder terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial

Nilai kepuasan layanan Sekretariat Jenderal mengukur tingkat kepuasan pelayanan Sekretariat Jenderal dengan melakukan survey pelayanan ke stakeholder terkait

Nilai diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden

Penilaian merujuk pada Permen PAN dan RB Nomor 14 tahun 2017

Survey kepuasan stakeholder dilakukan terhadap stake holder Direktorat jenderal pemberdayaan sosial terhadap 14 layanan:



Capaian Indeks kepuasan stakeholder Ditjen pemberdayaan sosial adalah 101,17% hal ini didapat dari capaian dengan nilai sebesar 91,05 Dari target nilai 90.

- ✓ Layanan BMN
- ✓ Layanan Kearsipan
- ✓ Layanan Kehumasan
- ✓ Layanan Kesekretariatan Lainnya
- ✓ Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- ✓ Pelayanan Hukum
- ✓ Perbendaharaan (Pelaksanaan dan Pengelolaan)
- ✓ Layanan Komunitas Adat Terpencil
- ✓ Layanan Kewirausahaan Sosial (Pahlawan Ekonomi)
- ✓ Layanan Bansos Sembako
- ✓ Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
- ✓ Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)
- ✓ Izin Tanda Daftar LKS Berskala Nasional
- ✓ Layanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)
- ✓ Layanan Tunjangan Kehormatan Warakuri/Keluarga Pahlawan Nasional
- ✓ Layanan Calon Penerima Satyalencana Kebaktian Sosial
- ✓ Layanan Calon Perintis Kemerdekaan dan Usulan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan
- ✓ Layanan Pilar-pilar Sosial
- ✓ Layanan Puskesmas/SLRT
- ✓ Layanan Badan Usaha/CSR Kesejahteraan Sosial
- ✓ Layanan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional



Karakteristik Responden

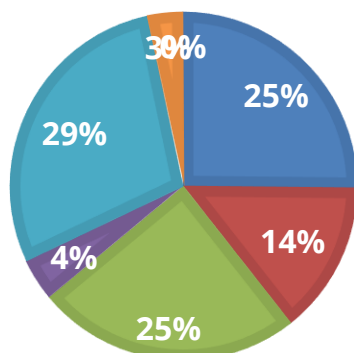
1066

Capaian Survei Kepuasan Direktorat Pemberdayaan Sosial Per Unsur Tahun 2022

Unsur SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	90,51	0,517	12,93	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	92,34	0,528	13,19		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	89,46	0,511	12,78		
Kecepatan Layanan	91,12	0,521	13,02		
Kemudahan Metode	91,82	0,525	13,12		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	90,49	0,517	12,93		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	92,17	0,527	13,17		
Penanganan Pengaduan	90,66	0,403	10,07		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	91,95	0,409	10,22		
INDEKS KEPUASAN		3,642	91,05		

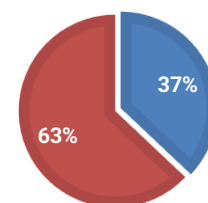
PENDIDIKAN

■ SD ■ SMP ■ SMA
 ■ D1/D2/D3 ■ D4/S1 ■ S2
 ■ S3



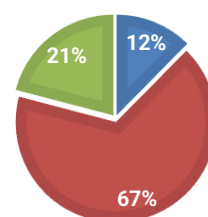
JENIS KELAMIN

■ LAKI-LAKI ■ PEREMPUAN



USIA RESPONDEN

■ <30 Thn ■ 31-40mThn ■ >50 thn



■ Unsur Responden



**CAPAIAN SURVEI KEPUASAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
PER UNSUR & PROGRAM TAHUN 2022**

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	89,66%	0,398	9,96	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	89,87%	0,399	9,99		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	88,79%	0,395	9,87		
Kecepatan Layanan	90,30%	0,401	10,03		
Kemudahan Metode	92,03%	0,409	10,23		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	90,95%	0,404	10,11		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	90,73%	0,403	10,08		
Penanganan Pengaduan	90,30%	0,401	10,03		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	92,24%	0,410	10,25		
INDEKS KEPUASAN		3,622	90,54		
No	PROGRAM	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat	
1	Layanan BAKN	3,685	92,13	Sangat Baik	
2	Layanan Kearsipan	3,867	96,67	Sangat Baik	
3	Layanan Kehumasan	3,600	90,00	Sangat Baik	
4	Layanan Kesekretariatan Lainnya	3,637	90,91	Sangat Baik	
5	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3,651	91,27	Sangat Baik	
6	Pelayanan Hukum	3,730	93,25	Sangat Baik	
7	Perbendaharaan (Pelaksanaan dan Pengelolaan)	3,472	86,81	Baik	

**CAPAIAN SURVEI KEPUASAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN
PER UNSUR & PROGRAM TAHUN 2022**

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	91,63%	0,407	10,18	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	93,49%	0,415	10,39		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	90,29%	0,401	10,03		
Kecepatan Layanan	92,19%	0,410	10,24		
Kemudahan Metode	92,76%	0,412	10,31		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	91,42%	0,406	10,16		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	92,92%	0,413	10,32		
Penanganan Pengaduan	92,19%	0,410	10,24		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	93,49%	0,415	10,39		
INDEKS KEPUASAN		3,691	92,26		
No	Program	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat	
1	Layanan Bansos Sembako	3,691	92,26	Sangat Baik	

**CAPAIAN SURVEI KEPUASAN DIREKTORAT POTENSI & SUMBERDAYA SOSIAL
PER UNSUR & PROGRAM TAHUN 2022**

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	92,31%	0,410	10,26	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	92,95%	0,413	10,33		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	89,74%	0,399	9,97		
Kecepatan Layanan	92,95%	0,413	10,33		
Kemudahan Metode	94,23%	0,419	10,47		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	92,63%	0,412	10,29		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	93,91%	0,417	10,43		
Penanganan Pengaduan	92,95%	0,413	10,33		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	92,95%	0,413	10,33		
INDEKS KEPUASAN		3,709	92,74		
No	PROGRAM	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat	
11	Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)	3,715	92,87	Sangat Baik	
12	Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah (UGB)	3,821	95,52	Sangat Baik	
13	Izin Tanda Daftar UKS Berskala Nasional	3,531	88,27	Baik	
14	Layanan Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN)	3,456	86,39	Baik	

**CAPAIAN SURVEI KEPUASAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PER UNSUR & PROGRAM TAHUN 2022**

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	85,79%	0,381	9,53	B	Baik
Keramahan dan Kesopanan	87,95%	0,391	9,77		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	84,44%	0,375	9,38		
Kecepatan Layanan	87,05%	0,387	9,67		
Kemudahan Metode	88,31%	0,392	9,81		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	86,24%	0,383	9,58		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	88,04%	0,391	9,78		
Penanganan Pengaduan	87,05%	0,387	9,67		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	87,95%	0,391	9,77		
INDEKS KEPUASAN		3,479	86,98		
No	PROGRAM	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat	
1	Layanan Tunjangan Kehormatan Warakuri/Keluarga Pahlawan Nasional	3,778	94,44	Sangat Baik	
2	Layanan Calon Penerima Satyalencana Kebaktian Sosial	3,764	94,10	Sangat Baik	
3	Layanan Calon Perintis Kemerdekaan dan Usulan Janda/Duda Perintis Kemerdekaan	3,622	90,56	Sangat Baik	
4	Layanan Pilar-pilar Sosial	3,462	86,56	Baik	
5	Layanan Puskesmas/SLRT	3,462	86,56	Baik	
6	Layanan Badan Usaha/CSR Kesejahteraan Sosial	3,595	89,87	Sangat Baik	
7	Layanan Pengusulan Calon Pahlawan Nasional	3,495	87,37	Baik	

**CAPAIAN SURVEI KEPUASAN DIREKTORAT PEMBERDAYAAN KELOMPOK ADAT TERPENCIL & KEWIRUSAHAAN SOSIAL
PER UNSUR & PROGRAM TAHUN 2022**

UNSUR SKM	Nilai Unsur	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Kualitas & Ketersediaan Sarana & Prasarana	90,17%	0,401	10,02	A	Sangat Baik
Keramahan dan Kesopanan	95,13%	0,423	10,57		
Kompetensi/ Kemampuan Petugas	93,45%	0,415	10,38		
Kecepatan Layanan	90,36%	0,402	10,04		
Kemudahan Metode	93,35%	0,415	10,37		
Kemudahan Prosedur Pelayanan	92,79%	0,412	10,31		
Kesesuaian Persyaratan Data & Dokumen	92,13%	0,404	10,24		
Penanganan Pengaduan	90,36%	0,402	10,04		
Bebas Pungutan & Gratifikasi	92,13%	0,404	10,24		
INDEKS KEPUASAN		3,688	92,21		

No	PROGRAM	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Predikat	
1	Layanan Komunitas Adat Terpencil	3,650	91,26	Sangat Baik	
2	Layanan Kewirusahaan Sosial (Pahlawan Ekonomi)	3,701	92,53	Sangat Baik	

B. REALISASI PROGRAM PRIORITAS NASIOAL

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial telah mendukung pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kegiatan Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai Program Prioritas Nasional adalah Penyelenggaraan Program Sembako, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT), Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) -Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Pemberdayaan TKSK, Pemberdayaan PSM, Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Program Kewirausahaan Sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA),.

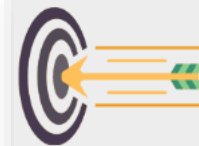
1. Penyelenggaraan Program Sembako



99,25
%

TARGET 18.000.000 KK

REALISASI 18.658.193 KK



SASARAN DAN TARGET

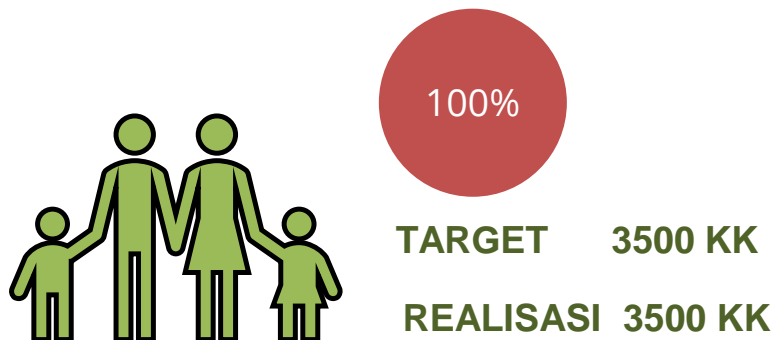
- Sasaran Program Sembako TA 2022 adalah sebanyak **18.800.000 KPM** keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS
- Dengan sebaran di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.



METODE

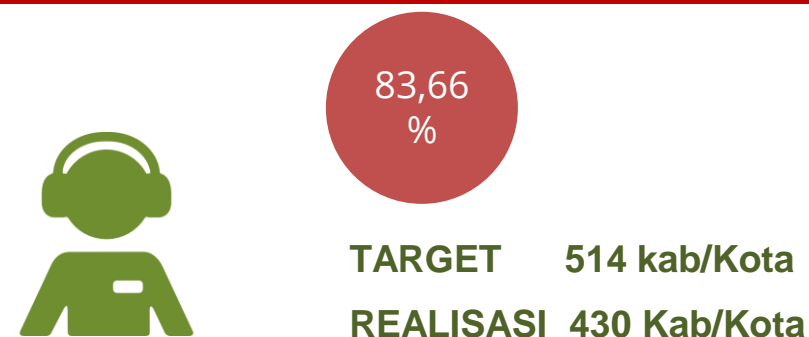
- Data KPM program sembako bersumber dari Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
- Penyaluran program sembako tahun 2022 dilaksanakan bekerja sama dengan PT POS
- Pendampingan dan pemantauan program sembako dilaksanakan oleh pendamping sosial dan dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota

2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)



Kebijakan pemberdayaan sosial terhadap KAT dengan memberikan Bantuan Stimulan Pemberdayaan Sosial terhadap KAT salah satunya dalam bentuk Bantuan Stimulan Pemukiman, Bantuan Balai Sosial (Community Center), Bantuan Sarana Air Bersih, MCK dan sarana lingkungan lainnya, Bantuan Sarana Pendidikan, Bantuan sarana dukungan Community Center, Bantuan Usaha Penghidupan Berkelanjutan Warga KAT serta bantuan sosial lainnya sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan warga KAT di lokasi.

3. Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tingkat Kabupaten/Kota



Puskesmas-SLRT dibentuk untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi, responsive dan tepat sasaran serta mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kerentanan yang menjadi komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals SDGs)

Pengembangan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) tingkat Kabupaten/Kota dengan target sebanyak 514 Kab/Kota terealisasi 430 kab/Kota

Realiasi 83,66% sudah melebihi target capaian 74%

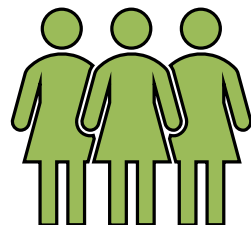
4. Pengembangan puskesmas tingkat desa/kelurahan



Puskesmas- dibentuk untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial yang terintegrasi, responsive dan tepat sasaran serta mendukung percepatan penurunan kemiskinan dan kerentanan yang menjadi komitmen global yang tertuang dalam Sustainable Development Goals SDGs)

Pengembangan pusat Kesejahteraan sosial tingkat desa/Kelurahan dengan target sebanyak 728 Desa/Kelurahan terealisasi 728 Desa/Kelurahan

5. Tenaga kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diberdayakan

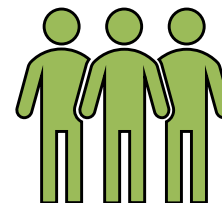


91,28
%

TARGET 7230 Orang
REALISASI 6600 Orang

TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/ instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah penugasan di kecamatan

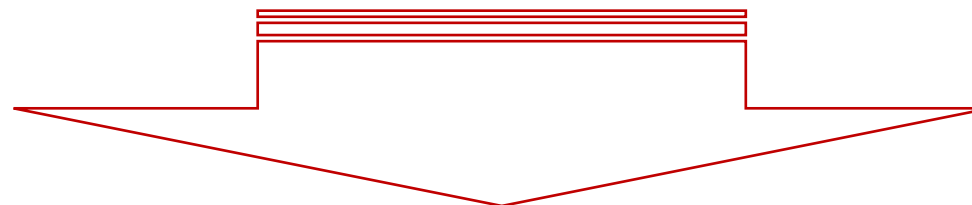
6. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang diberdayakan



24,13
%

TARGET 3000 Orang
REALISASI 724 Orang

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial



Alasan Penyebab realisasi tidak mencapai target

- ✓ Pembatasan pertemuan dalam skala besar
- ✓ Jangkauan PSKS ke seluruh wilayah Indonesia masih sering terkendala oleh keterbatasan sinyal internet
- ✓ Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas psks perorangan secara daring

7. Penguatan Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)

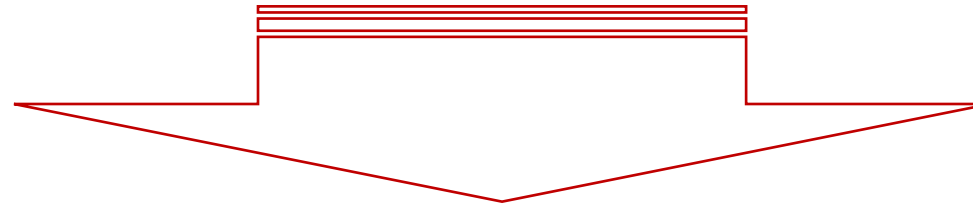


23%

TARGET 200 Desa/kelurahan

REALISASI 26 Desa/kelurahan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi badan usaha sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.



Alasan Penyebab realisasi tidak mencapai target

- ✓ Perubahan Nomenklatur, struktur organisasi, serta ketersediaan SDM pengelola kegiatan BU TJL membawa implikasi pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan BU TJL
- ✓ Adanya realokasi anggaran untuk penyaluran tali asih TKSK sebesar 583.000.000 menjadi salah satu kendala pelaksanaan pencapaian target kinerja badan Usaha yang melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Realokasi anggaran pada kegiatan BU TJL ini semula diperuntukan melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsolidasi terhadap badan usaha di Jakarta dan di daerah yang masih melaksanakan TJL nya., serta melaksanakan sinergitas ke pemerintah daerah untuk menemukaenali dan mendapatkan kesepahaman tentang peran, fungsi dan tanggungjawab badan usaha/perusahaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- ✓ Adanya blokir automatic di anggaran BU TJL sebesar Rp.2.700.000.000 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 menyebabkan percepatan penyerapan anggaran terhambat karena adanya kebijakan pembatasan pertemuan kegiatan dalam skala besar dan adanya skala prioritas kebutuhan organisasi untuk memenuhi sarana dan prasarana TMP maka pelaksanaan kegiatan BU TJL tidak dapat dilaksanakan

8. Layanan Kartu Sembako



91,28
%

TARGET 8 Layanan

REALISASI 8 layanan

Kartu Sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan. Sebelumnya, kebutuhan pokok yang dapat diterima hanya terdiri dari komoditas beras dan telur. Saat ini, lebih bervariasi tidak hanya beras tetapi jenis karbohidrat lain, tidak hanya telur untuk protein hewani, tetapi juga protein nabati, sayuran hingga buah.



C. CAPAIAN PROGRAM LAINNYA

KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)



100%

TARGET 20.650.000 Keluarga

REALISASI 20.650.000 Keluarga

2022



Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk melindungi daya beli masyarakat prasejahtera akibat tekanan berbagai kenaikan harga secara global.

BLT BBM ini, ditujukan untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan harian. Pemanfaatan bantuan BLT BBM dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat

BLT BBM merupakan salah satu program untuk pemulihan ekonomi nasional.

Nilai Bantuan BLT BBM sejumlah Rp.150.000/KPM/bulan selama 4 bulan yaitu pada bulan September, Oktober, November dan Desember 2022.

Realisasi Per 31 Desember 2022 sukses salur BLT BBM sebanyak 20.650.000 KPM (100%)

REALISASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI PER BULAN

TAHAP	SUKSES SALUR		TRANSAKSI	
	KPM	ANGGARAN	KPM	ANGGARAN
SEPTEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000	20.449.784	3.067.467.600.000
OKTOBER	20.650.000	3.097.500.000.000	20.449.784	3.067.467.600.000
NOVEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000	20.650.000	3.097.500.000.000
DESEMBER	20.650.000	3.097.500.000.000	20.650.000	3.097.500.000.000
TOTAL		12.390.000.000.000		12.329.935.200.000

KPM YANG MEMPEROLEH BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) MINYAK GORENG (MIGOR)



98,76
%

TARGET 20.393.400 KPM

REALISASI 19.565.880 KPM

BLT MINYAK GORENG disalurkan kepada:

- ✓ Keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- ✓ Program Keluarga Harapan (PKH)
- ✓ Pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan gorengan.

Anggaran: Rp6.195.000.000.000,-

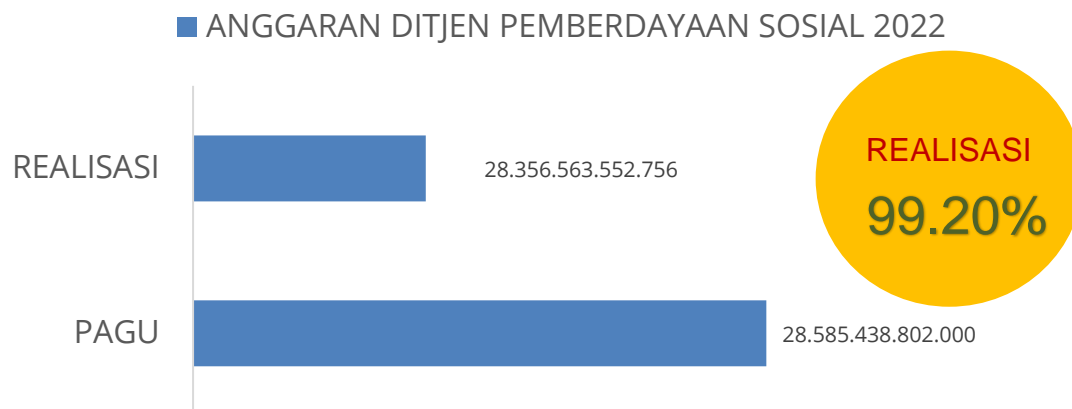
Sukses Salur: Rp6.118.020.000.000,- (98,76%)

Transaksi: Rp5.869.764.000.000,- (Rp94,75%)



B. REALISASI ANGGARAN

ANGGARAN DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL 2022



Realisasi anggaran tahun 2021 Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial sebesar 99,20%. Persentase realisasi anggaran tahun 2022 lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun sebelumnya yang mencapai 96,91%.

Perbandingan realisasi anggaran 5 tahun terakhir sebagai berikut :



Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi belanja pegawai dan barang paling rendah dibandingkan dengan persentase capaian realisasi belanja barang, modal dan bantuan sosial. Persentase belanja pegawai hanya mencapai 65,80% hal ini dikarenakan perubahan OTK baru di Kementerian Sosial Sehingga berakibat pada perubahan komposisi pegawai dilingkungan Ditjen Pemberdayaan Sosial.

Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
Bansos	27.258.821.469.000	27.092.511.772.000	99,39
Modal	7.022.090.000	6.995.298.500	99,62
Barang	1.310.382.797.000	1.250.994.517.742	95,47
Pegawai	9.212.446.000	6.061.964.514	65,80

Realisasi Anggaran per Kegiatan

NO	KEGIATAN	PAGU	REALISASI	PERSEN
1	Pemberdayaan dan Pelayanan perizinan	158.067.203.000	140.799.556.259	89,08
2	Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	73.303.268.000	70.647.397.650	96,38
3	Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	2.764.150.000	611.087.617	22,11
4	Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil	81.077.059.000	79.757.700.115	98,37
5	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial	549.200.000	547.589.579	99,71
6	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	18.682.548.000	14.882.573.025	79,66
7	Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial	202.560.000	190.064.215	93,83
8	Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial	323.950.000	247.874.254	76,52
9	Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial	59.462.576.000	33.741.732.500	56,74
10	Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	28.191.006.288.000	28.015.137.977.542	99,38

Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran tahun 2022 antara lain :

- ✓ Adanya OTK baru
- ✓ Terbitnya DIPA OTK baru yang sudah memasuki akhir Triwulan III
- ✓ Adanya blokir yang baru dibuka di bulan September dan Desember 2022
- ✓ Pembatasan kegiatan perjadi atau paket meeting
- ✓ Realokasi untuk tali asih TKSK

Beberapa Langkah yang dilaksanakan untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2022 :

- ✓ Kegiatan dilaksanakan secara "keroyokan" dengan melibatkan lintas UKE baik UKE2 maupun UKE1
- ✓ Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, pendamping sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial, maupun intitusi penyalur Bansos dan Dinas Sosial baik Provinsi maupun Kabupaten.
- ✓ Mempercepat buka blokir kegiatan PENA di bulan September sebesar 59 milyar
- ✓ Buka Blokir AA senilai 10,6 Milyar di Dit Pemberdayaan Masyarakat dan 2,8 Milyar di Dit. KAT.
- ✓ Perubahan peruntukan dari belanja perjadi/paket meeting ke belanja non operasional lainnya (seperti Pembelian barang) maupun ke belanja modal Sehingga lebih cepat terserap.

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pelaksanaan program Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 sudah terlaksana, dengan rata-rata capaian kinerja seperti yang tertera pada poin-point sebelumnya. Selama tahun 2022, adalah tahun dengan OTK baru sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Sosial berpengaruh terhadap pencapaian target program pemberdayaan sosial. Berikut beberapa efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Sosial:

Sasaran Program 1



- ✓ Keberadaan pendamping sosial dalam pelaksanaan penyelenggaraan program sembako meningkatkan efektifitas pencapaian target program.
- ✓ Koordinasi yang baik antara stakeholder, baik itu institusi penyalur sembako, institusi pemerintah daerah dan pendamping sosial dalam penyaluran program sembako.
- ✓ Kondisi pandemi Covid-19 dapat diantisipasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (video conference) dalam sosialisasi, koordinasi maupun monitoring dan evaluasi.
- ✓ Pendampingan Pemberdayaan KAT oleh LKS turut melakukan pengembangan berbagai program serta berkolaborasi dengan berbagai sistem sumber baik dunia usaha maupun pemda setempat Selain menggunakan Dana APBN, pemberdayaan KAT menggandeng Dunia Usaha baik itu penyelenggara UGB maupun Penyelenggara PUB.

Sasaran Program 2



Peran LKS dalam proses Pemberdayaan KAT memiliki peran yang sangat penting dengan 3 fungsinya :

Fungsi administrasi :

1. Terkait dengan pengelolaan administrasi selama proses pendampingan sosial: Penyusunan KAK, RAB, pencatatan dan pendataan yang berkenaan dengan kondisi geografis, demografis, sosial, budaya berikut kelengkapan hak – hak sipil; Identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber; Pelaporan dan dokumentasi
2. Fungsi operasional : Pendamping sosial melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk Membangkitkan kesadaran masyarakat; Menyampaikan informasi, dukungan dan fasilitasi kelompok; Mencari, pemanfaatan sumberdaya; Mengorganisasi program dan pelatihan keterampilan : Fungsi koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai pihak (*networking*) melalui koordinasi; advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat; Mengembangkan jaringan serta membagi pengetahuan dan pengalaman; Pemanfaatan dan pendayagunaan sistem sumber kelembagaan yang berada di luar lingkungan warga KAT untuk membantu dalam pemecahan masalah warga KAT.

Sasaran Program 3



Peran LKS dalam proses Pemberdayaan KAT dengan sasaran program meningkatnya kemandirian sosial ekonomi memiliki peran yang sangat penting dengan 3 fungsinya :

Fungsi administrasi :

a. Terkait dengan pengelolaan administrasi selama proses pendampingan sosial:

- Penyusunan KAK, RAB, pencatatan dan pendataan yang berkenaan dengan kondisi geografis, demografis, sosial, budaya berikut kelengkapan hak – hak sipil
- Identifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber.
- Pelaporan dan dokumentasi

b. Fungsi operasional

Pendamping sosial melaksanakan berbagai kegiatan dalam bentuk:

- Membangkitkan kesadaran masyarakat.
- Menyampaikan informasi, dukungan dan fasilitas kelompok.
- Mencari, pemanfaatan sumberdaya.
- Mengorganisasi program dan pelatihan keterampilan.

c. Fungsi koordinasi dan Kerjasama

- Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*networking*) melalui koordinasi, advokasi, memanfaatkan media, hubungan masyarakat.
- Mengembangkan jaringan serta membagi pengetahuan dan pengalaman.
- Pemanfaatan dan pendayagunaan sistem sumber kelembagaan yang berada di luar lingkungan warga KAT untuk membantu dalam pemecahan masalah warga KAT.



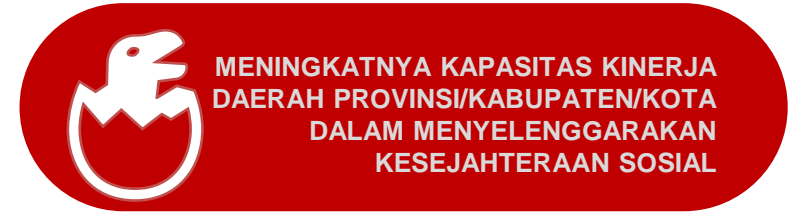
Peran pendamping sosial dengan terlibat dan partisipasi aktif di lapangan. Pendamping sosial sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Sosial dalam pemberian bantuan dan juga monitoring evaluasi bagi penerima manfaat PENA. Hal ini dimaksudkan agar program PENA dapat terawasi dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi para KPM.

Sasaran Program 4.



- ✓ PSKS Perorangan dan Kelembagaan tersebar di seluruh Indonesia sangat berperan dalam penyelenggaraan kesos.
- ✓ Adanya Bimbingan Teknis atau Peningkatan kapasitas bagi Pilar-pilar Sosial yang dilaksanakan secara online Pengembangan Aplikasi Pelaporan bagi TKS-K sehingga mempermudah dan mempercepat pelaporan dalam pelaksanaan pelayanan sosial yang sesuai dengan standar
- ✓ Terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Undian yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia sehingga dapat memantau proses penyelenggaraan UGB di berbagai daerah.
- ✓ Pelaksanaan Restorasi Sosial yang melibatkan partisipasi berbagai pihak baik dari K/L Lain dan Dunia Usaha.
- ✓ Partisipasi bisa dalam bentuk uang, barang maupun jasa.

Sasaran Program 5.



- ✓ Partisipasi sector non pemerintah (media, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, pihak swasta) dalam pelaksanaan dan pemanfaatan hasil SLRT.
- ✓ Komitmen pemangku kepentingan pusat dan daerah terkait pelaksanaan SLRT yang dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan, SK Direktur Jenderal dan Keputusan Pemerintah daerah.
- ✓ Penyelenggaraan Bimbingan Teknis SLRT melalui metode ELearning yang mengurangi pertemuan tatap muka dan waktu lebih efisien. Adanya Web SIKS-NG modul SLRT untuk menyimpan keluhan yang masuk ke Puskesmas-SLRT.

Sasaran Program 6.



- ✓ Penerapan kebiasaan baru dalam hal pelaksanaan rapat-rapat dilaksanakan secara langsung dan daring.
- ✓ Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi secara online sehingga mengurangi penggunaan kertas dan waktu lebih efisien
- ✓ Penggunaan Cloud untuk penyimpanan file sehingga lebih mudah diakses dimana saja dan kapan saja
- ✓ Sistem surat-menyurat yang menggunakan SIKD sehingga lebih efektif dan efisien.

Sasaran Program 7.



- ✓ Perkembangan teknologi informasi yang memudahkan pelaksanaan survey dilaksanakan secara daring.
- ✓ PSKS Perorangan dan Kelembagaan tersebar di seluruh Indonesia sangat berperan dalam memudahkan pelaksanaann survey

BAB IV PENUTUP



KESIMPULAN

Penyusunan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial selama periode tahun 2022.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja 2022, Ditjen Pemberdayaan mempunyai 7 Sasaran Program dan 14 Indikator Kinerja Program. Rata-rata Capaian Kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial sebesar 173,66%. Terdapat 3 Indikator dengan Capaian kurang dari 100% dan lainnya lebih dari 100%. Capaian Kinerja masing-masing Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Program 1 : “Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak Dasar” rata-rata capaian : 99,62%
2. Sasaran Program 2 : “Meningkatnya Kemampuan dalam Menjalankan Tanggung Jawab dan Peranan Sosial” rata-rata capaian : 125%
3. Sasaran Program 3 : “Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi” rata-rata capaian : 96,71%
4. Sasaran Program 4 : “Meningkatnya profesionalisme Penyelenggara Kesejahteraan Sosial” rata-rata capaian : 86,80%
5. Sasaran program 5 : “Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Daerah Provinsi/Kab/Kota dalam penyelenggaraan Kesos” rata-rata capaian 113,05%
6. Sasaran Program 6 : “Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Sosial yang Berkualitas” rata-rata capaian 102,74%
7. Sasaran Program 7 : “Meningkatnya Kepuasan Stakeholder Terhadap Layanan Kementerian Sosial” ” rata-rata capaian : 101,17%.



SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja yang lebih baik lagi maka perlu dilakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

- Memperkuat sinergi antar satuan kerja di Kementerian Sosial, antar Kementerian/Lembaga, dan Dinas Sosial provinsi atau Kabupaten/Kota,
- Optimalisasi Teknologi Informasi untuk menunjang tugas dan fungsi,
- Penetapan target kinerja yang berorientasi pada output/outcome,
- Penguatan kapasitas PSKS perorangan maupun lembaga, serta kapasitas pegawai direktorat pengampu,
- Lebih selektif dalam memilih LKS pendamping KAT untuk mengawal, memfasilitasi pokmas dalam mengoptimalkan pemberdayaan dan pemanfaatan bantuan stimulan pembangunan rumah/BBR dan bantuan stimulan lainnya (jadup, bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga);
- Pengembangan konsep community center dalam pemberdayaan KAT agar dapat memperluas jangkauan layanan sosial.
- Peningkatan kualitas sumber daya pendamping sosial, warga dan petugas pengelola kegiatan KAT melalui pendidikan, pelatihan, maupun pembinaan langsung; Efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan pemberdayaan akan lebih ditingkatkan untuk pencapaian tujuan pemberdayaan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL OTK LAMA



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Suharto
Jabatan : Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial
selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Tri Rismaharini
Jabatan : Menteri Sosial Republik Indonesia
selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Menteri Sosial RI



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1. Terpuhinya kebutuhan dan hak dasar	1. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	1. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80%
3. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	1. Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya	60%
	2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya	50%
4. Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial	1. Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91%
	2. Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82%
	3. Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89%
5. Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	1. Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74%
6. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	1. Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,3
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	80
	3. Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
	4. Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90%
7. Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

Program/Kegiatan	Anggaran
1. Perlindungan Sosial	Rp. 368.121.822.000
a. Kegiatan Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	Rp. 31.523.975.000
b. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	Rp. 180.227.094.000
c. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	Rp. 65.549.668.000
d. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat	Rp. 90.821.085.000
2. Dukungan Manajemen	Rp. 45.763.457.000
a. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	Rp. 1.016.947.000
b. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum	Rp. 43.979.245.000
c. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp. 365.965.000
d. Kegiatan Legislasi dan Litigasi	Rp. 401.300.000
<i>Jumlah</i>	Rp. 413.885.279.000

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua,
Menteri Sosial RI



Tri Rismaharini

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial



Edi Suharto

PERJANJIAN KINERJA DIRJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL OTK BARU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1. Terpuhinya kebutuhan dan hak dasar	1. Persentase % penerima manfaat program sembako yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
	2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang terpenuhi kebutuhan dan hak dasar	100%
2. Meningkatnya kemampuan dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	1. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tanggung jawab dan peranan sosial	80%
3. Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi	1. Persentase (%) penerima manfaat kewirausahaan sosial Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA) yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya	60%
	2. Persentase (%) warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang meningkatkan kemandirian sosial ekonominya	50%
4. Meningkatnya profesionalisme penyelenggara kesejahteraan sosial	1. Persentase (%) pendamping pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan dan pendampingan sosial secara optimal sesuai standar	91%
	2. Persentase (%) lembaga di bidang kesejahteraan sosial binaan Ditjen pemberdayaan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai dengan standar	82%
	3. Persentase (%) Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Penyelenggara Pengumpulan Uang atau barang (PUB) yang Melaksanakan penyelenggaraan UGB dan PUB secara Optimal sesuai Standar	89%
5. Meningkatnya kapasitas dan kinerja daerah provinsi/ kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial	1. Persentase (%) daerah yang menangani aduan/ keluhan sesuai standar	74%
6. Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang berkualitas	1. Nilai PMPRB Ditjen Pemberdayaan Sosial	36,3
	2. Nilai akuntabilitas kinerja Ditjen Pemberdayaan Sosial	80

Sasaran Program		Indikator Kinerja	Target
		3. Nilai kinerja anggaran Ditjen Pemberdayaan Sosial	90
		4. Persentase (%) naskah hukum Ditjen Pemberdayaan Sosial yang ditetapkan	90%
7.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Kementerian Sosial	1. Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> terhadap layanan Ditjen Pemberdayaan Sosial	90

Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
Program Perlindungan Sosial	15.026.792.143.000
1. Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	75.139.202.000
2. Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	65.664.922.000
3. Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	62.785.217.000
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	81.077.059.000
5. Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	14.742.125.743.000
Program Dukungan Manajemen	21.541.549.000
1. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial	549.200.000
2. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Pemberdayaan Sosial	20.465.839.000
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial	202.560.000
4. Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial	323.950.000
TOTAL ANGGARAN	15.048.333.692.000

Jakarta, September 2022

Pihak Kedua,
Menteri Sosial RI


Tri Rismaharini

Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial


Edi Suharto

REALISASI ANGGARAN DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL TAHUN 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	6273 Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan	PAGU	0	20,024,044,000	7,022,090,000	0	0	0	131,021,069,000	0	0	158,067,203,000
		REALISASI	0.00%	19,586,085,759 (97.81%)	6,995,298,500 (99.62%)	0.00%	0.00%	0.00%	114,218,172,000 (87.18%)	0.00%	0.00%	140,799,556,259 (89.08%)
		SISA	0	437,958,241	26,791,500	0	0	0	16,802,897,000	0	0	17,267,646,741
2	6274 Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu	PAGU	0	73,303,268,000	0	0	0	0	0	0	0	73,303,268,000
		REALISASI	0.00%	70,647,397,650 (96.38%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	70,647,397,650 (96.38%)
		SISA	0	2,655,870,350	0	0	0	0	0	0	0	2,655,870,350
3	6275 Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi	PAGU	0	2,764,150,000	0	0	0	0	0	0	0	2,764,150,000
		REALISASI	0.00%	611,087,617 (22.11%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	611,087,617 (22.11%)
		SISA	0	2,153,062,383	0	0	0	0	0	0	0	2,153,062,383
4	6276 Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	PAGU	0	21,452,059,000	0	0	0	0	59,625,000,000	0	0	81,077,059,000
		REALISASI	0.00%	20,172,700,115 (94.04%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	59,585,000,000 (99.93%)	0.00%	0.00%	79,757,700,115 (98.37%)
		SISA	0	1,279,358,885	0	0	0	0	40,000,000	0	0	1,319,358,885
5	6296 Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Pemberdayaan Sosial	PAGU	0	549,200,000	0	0	0	0	0	0	0	549,200,000
		REALISASI	0.00%	547,589,579 (99.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	547,589,579 (99.71%)
		SISA	0	1,610,421	0	0	0	0	0	0	0	1,610,421
6	6297 Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Pemberdayaan Sosial	PAGU	9,212,446,000	9,470,102,000	0	0	0	0	0	0	0	18,682,548,000
		REALISASI	6,061,964,514 (65.80%)	8,820,608,511 (93.14%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	14,882,573,025 (79.66%)
		SISA	3,150,481,486	649,493,489	0	0	0	0	0	0	0	3,799,974,975
7	6298 Pengelolaan Organisasi dan SDM Pemberdayaan Sosial	PAGU	0	202,560,000	0	0	0	0	0	0	0	202,560,000
		REALISASI	0.00%	190,064,215 (93.83%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	190,064,215 (93.83%)
		SISA	0	12,495,785	0	0	0	0	0	0	0	12,495,785

hal : 1 dari 2 halaman

tanggal cetak : 02-02-23 16:53:46 oleh : 690556



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

8	6299 Legislasi dan Litigasi Pemberdayaan Sosial	PAGU REALISASI	0 0.00%	323,950,000 247,874,254 (76.52%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	323,950,000 247,874,254 (76.52%)
		SISA	0	76,075,746	0	0	0	0	0	0	0	76,075,746
9	6883 Penyelenggaraan Kewirausahaan Sosial	PAGU REALISASI	0 0.00%	55,212,576,000 33,270,732,500 (60.26%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	4,250,000,000 471,000,000 (11.08%)	0 0.00%	0 0.00%	59,462,576,000 33,741,732,500 (56.74%)
		SISA	0	21,941,843,500	0	0	0	0	3,779,000,000	0	0	25,720,843,500
10	6896 Penyelenggaraan Bantuan Program Sembako	PAGU REALISASI	0 0.00%	1,127,080,888,000 1,096,900,377,542 (97.32%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	27,063,925,400,000 26,918,237,600,000 (99.46%)	0 0.00%	0 0.00%	28,191,006,288,000 28,015,137,977,542 (99.38%)
		SISA	0	30,180,510,458	0	0	0	0	145,687,800,000	0	0	175,868,310,458
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	9,212,446,000 6,061,964,514 (65.80%)	1,310,382,797,000 1,250,994,517,742 (95.47%)	7,022,090,000 6,995,298,500 (99.62%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	27,258,821,469,000 27,092,511,772,000 (99.39%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	28,585,438,802,000 28,356,563,552,756 (99.20%)
		SISA	3,150,481,486	59,388,279,258	26,791,500	0	0	0	166,309,697,000	0	0	228,875,249,244

**REKAPITULASI DATA DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL TAHUN 2022**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
1	Aceh	1 Aceh Tenggara	1 Leuser	1 Lawe Serakut	1 Dusun Batu Siliang	65	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 325.000.000	Peduli Dhuafa
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 825.000.000	
		2 Aceh Jaya	2 Panga	2 Desa Gle Putoh	2 Dusun Seunong Bakti	43	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 215.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 240.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.065.000.000	
2	Sumatera Utara	3 Nias Utara	3 Tugala Oyo	3 Humene Siheneasi dan Fabaliwa Oyo	3 Dusun 3 dan Dusun 4	49	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 245.000.000	LKS PELMAS BNKP
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 745.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 745.000.000	
3	Sumatera Selatan	4 Empat Lawang	4 Roon	4 Syabes	4 Syabes	78	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 390.000.000	Kasih Bunda
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 890.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 890.000.000	

4	Sumatera Barat	5 Kepulauan Mentawai	5 Siberut Tengah	5 Simasoro	5 Simasoro	75	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 375.000.000	LKS Kaum
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 875.000.000	
			6 Siberut Utara	6 Malacan	6 Malacan Timur	48	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 240.000.000	Yayasan Kirekat Indonesia
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 265.000.000	
					7 Dusun Malacan	100	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 500.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 525.000.000	
			7 Siberut Barat Daya	7 Bubuaenen dan Ds. Pasakiat Talleleu	8 Maonai dan Panasat II	63	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 315.000.000	LKS Kaum
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 340.000.000	
					9 Maonai dan Panasat I	48	TH 3	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 240.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 240.000.000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		Rp 2.245.000.000	
5	Riau	6 Kepulauan Meranti	8 Tebing Tinggi	8 Batinsulir	10 Parit Tiga	30	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 150.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	Yayasan Anak Selat Pulau Panjang
					TOTAL BANTUAN					Rp 650.000.000	
			9 Pulau Merbau	9 Semukut	11 Dusun III Cemaning	40	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 700.000.000	Yayasan Anak Selat Pulau Panjang
			10 Tasik Putri Puyu	10 Tanjung Padang	12 Dusun I	25	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 125.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 150.000.000	
					13 Dusun II	27	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 135.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 160.000.000	Komunitas Emak Sehat
		7 Indragiri Hilir	11 Kemuning	11 Selensen	14 Sukajadi	27	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 135.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 160.000.000	LIVE MIMPADA MATI
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.820.000.000	
6	Kalimantan Tengah	8 Katingan	12 Katingan Hulu	12 Tumbang Sabetung	15 Tumbang Sabetung	52	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 260.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 760.000.000	

LIVE MIMPADA MATI

			13 Bukit Raya	13 Rantau Pandan	16 Rantau Pandan	40	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000	LKS MUTIARA HATI
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 700.000.000	
		9 Kapuas	14 Mandau Telawang	14 Lawang Tamang	17 Dusun Sei Bahinoli	51	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 255.000.000	LKS Tulus Hati
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 280.000.000	
				15 Masupa Ria	18 Dusun Teluk Lahung	57	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 285.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 310.000.000	
		10 Murung Raya	15 Sungai Babuat	16 Tambelum	19 Tambelum	51	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 255.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 280.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 2.330.000.000	
7	Kalimantan Barat	11 Melawi	16 Nanga Sokan	17 Melana	20 Duku Nanga Tapang	72	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 360.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 860.000.000	
				18 Keluing Taja	21 Duku Pako Seman	35	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 175.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 675.000.000	
		12 Sintang	17 Kayan Hulu	19 Nanga Masau	22 Gemare	27	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 135.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 635.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 2.170.000.000	
8	Kalimantan Timur	13 Berau	18 Gunung Tabur	20 Maluang	23 Maluang	80	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 400.000.000	Yayasan Rescue
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 900.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 900.000.000	
9	Kalimantan Selatan	14 Balangan	19 Halong	21 Marajal	24 Hambalang Dilantak	54	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 270.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 770.000.000	
		15 Hulu Sungai Tengah	20 Hulu Sungai Tengah	22 Datar Batung	25 Mindai dan Pacung	27	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 135.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	



								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4	Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN						Rp 635.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						Rp 1.405.000.000	
10	NTT	16 Sumba Barat Daya	21 Kodi Bagedo	23 Matakapore	26 Matakapore	97	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 485.000.000	UKS HATI NURANI
								2	Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4	Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN						Rp 985.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI						Rp 985.000.000	
11	NTB	17 Bima	22 Langgudu	24 Laju	27 Saranae	50	TH 1	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	Yayasan Insan Cita
								2	Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3	Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4	Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN						Rp 750.000.000	
			23 Lambu	25 Lambu	28 So Pali Na'e Laju	30	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 150.000.000	
								2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN						Rp 175.000.000	
			24 Tambora	26 Oibura	29 Oi Bura	51	TH 2	1	Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 255.000.000	
								2	Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	



NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
					TOTAL BANTUAN					Rp 280.000.000	
		18 Sumbawa	## Batu Lanteh	27 Baturoton	30 Ladan	28	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 140.000.000	FSPBI
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 165.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.370.000.000	
12	Sulawesi Tenggara	19 Muna	26 Kabawo	28 Wantiwo	31 Walepa	43	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 215.000.000	LKS AR RAHMAH
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 715.000.000	
		20 Buton	27 Lasalimu	29 Telaga Baru	32 Terapung	91	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 455.000.000	Yayasan Maqidah
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 955.000.000	
				30 Wasuamba	33 Maranuag	41	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 205.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 705.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 2.375.000.000	

13	Sulawesi Selatan	21 Bantaeng	28 Bantaeng	31 Kayu Loe	34 Bonto Buakang	50	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	Al Burhan
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 750.000.000	
		22 Tana Toraja	29 Sanggala Selatan	32 Batu alu	35 Ta'ba	50	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	Aman Toraya
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 750.000.000	
		23 Toraja Utara	30 Buntu Pepasan	33 Lembang Talimbang	36 Dassi-Dassi	50	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 275.000.000	
								TOTAL BANTUAN PER PROVINSI		Rp 1.775.000.000	
14	Gorontalo	24 Gorontalo Utara	31 Anggrek	34 Iloheluma	37 Iloheluma	50	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	Fatmawati
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 750.000.000	
			32 Manano	35 Zuriati	38 Damahu	54	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 270.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 770.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.520.000.000	
15	Sulawesi Utara	25 Kepulauan Sangihe	33 Tabukan Selatan	36 Laotongan	39 Laotongan	30	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 150.000.000	Yayasan Pendidikan Rakyat Sulawesi Utara
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 175.000.000	
		26 Kepulauan Talaud	34 Tampan Amma	37 Riung Utara dan Day	40 Sa'cu dan Siraat	60	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 300.000.000	Maritime and Indigeneous Culture Research Center
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 325.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 500.000.000	
16	Sulawesi Barat	27 Polewali Mandar	35 Bulu	38 Lenggo	41 Tanete	45	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 225.000.000	Global
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 725.000.000	
			36 Tubbi Taramanu	39 Besoangin Utara	42 Tameoro	42	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 210.000.000	Malaqbi Corporation
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 235.000.000	
			37 Bulu	40 Patambana	43 Bira	55	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 275.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 300.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.260.000.000	

17	Maluku	28 Pulau Buru	38 Lolong Guba	42 Wapsalit	44 Darlele	40	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000	Yayasan Al-Ishlah Bondowoso
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 700.000.000	
			39 Waelata	42 Waelo	45 Kotbesy	50	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 750.000.000	
				43 Waehata	46 Waekibo	21	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 105.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 130.000.000	
					47 Tampil	55	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 275.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 300.000.000	
				44 Waeflan	48 Ngade	50	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 250.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
								TOTAL BANTUAN		Rp 275.000.000	
		29 Maluku Tengah	40 Teluti	45 Ulahahan	49 Sikelem	9	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 45.000.000	Kompas Maluku Tengah
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
					TOTAL BANTUAN				Rp 70.000.000		
		30 Buru Selatan.	41 Waemasa	46 Waimasing	50 Waeula	49	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 245.000.000	LKSA Anthon Kleden
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN				Rp 270.000.000		
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI				Rp 2.495.000.000		
18	Maluku Utara	31 Halmahera Tengah	42 Weda Tengah	47 Kulo Jaya	51 Kulo Jaya	21	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 105.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN				Rp 605.000.000		
		32 Kep. Taliabu	43 Taliabu Selatan	48 Pencado	52 Wayo Koding	21	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 105.000.000	The Teblings
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN				Rp 605.000.000		
					53 Wayo Panga	40	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 200.000.000	The Teblings
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN				Rp 700.000.000		



			44 Taliabu Utara	49 Wahe	54 Dusun Pantau Dan Ngong Wayo	69	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 345.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 370.000.000	
		33 Halmahera Utara	45 Kao Utara	50 Gamlahe	55 Gamlahe	14	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 70.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 95.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 2.375.000.000	
19	Papua Barat	34 Teluk Wondama	46 Roon	51 Syabes	56 Syabes	78	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 390.000.000	Yayasan Maneta Tanda Tora
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 890.000.000	
			47 Nikiwar	52 Kampung Kurei	57 Kampung Kurei	44	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 220.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 245.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 1.135.000.000	
20	Papua	35 Jayapura	48 Kaureh	53 Sostek	58 Sostek	17	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 85.000.000	Yayasan Papua Penuh Kemuliaan Allah
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 585.000.000	
			49 Yapsi	54 Kwarya	59 Kwarya	31	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 155.000.000	Immanuel Tugu Karya
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 655.000.000	
			50 Denta	55 Kamdera	60 Kamdera	29	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 145.000.000	Forum Remaja Independen Papua
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 645.000.000	
			51 Gresi Selatan	56 Klaisu	61 Iwang	56	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 280.000.000	Yayasan Papua Penuh Kemuliaan Allah
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 305.000.000	
				57 Bangai	62 Bangai	35	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 175.000.000	Yayasan Bina Karya
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 200.000.000	
			52 Kentuk	58 Binguin Progo	63 Aun	42	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 210.000.000	Immanuel Tugu Karya
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 235.000.000	
				59 Sekori	64 Sekori	19	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 95.000.000	Forum Remaja Independen Papua
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 120.000.000	
			53 Alru	60 Pagai	65 Pagai	57	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 285.000.000	Yayasan Abdi Budaya Nusantara
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 310.000.000	



		36 Keerom	54 Totwe	61 Lules	66 Lules	25	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 125.000.000	Biro Konsultasi Pengembangan Masyarakat Adat Papua (BIKPEMAP)
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 150.000.000	
				62 Milki	67 Wie	42	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 210.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 235.000.000	
					68 Atre	24	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 120.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 145.000.000	
			55 Kaisenar	63 Onam	69 Onam II	24	TH 2	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 120.000.000	
								2 Bantuan Stimulan Peng. Berkelanjutan	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 145.000.000	
			56 Web	64 Semografi	70 Semografi	21	TH 3	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 105.000.000	Yayasan Pengembangan Potensi dan Pendidikan Anak Papua
					TOTAL BANTUAN					Rp 105.000.000	
		37 Asmat	57 Soator	65 Bubis	71 Esaun	58	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 290.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 790.000.000	
					72 Bubis	51	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 255.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	LOKASI/DUSUN	KK	TH PEMB	JENIS BANTUAN	NILAI	TOTAL	NAMA LKS
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 755.000.000	
			58 Koroway Buluanop	66 Kapayap III	73 Kapayap III	37	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 185.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 685.000.000	
				67 Ayak	74 Ayak	35	TH 3	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 175.000.000	Yayasan Asmat Maju dan Sejahtera
					TOTAL BANTUAN					Rp 175.000.000	
		38 Dogiyai	59 Kammu Utara	68 Godide	75 Godide	35	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 175.000.000	
								2 Bantuan Balai Sosial	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								3 Bantuan Sarana Air Bersih dan MCK	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	
								4 Bantuan Sarpras Pendidikan	Rp 100.000.000	Rp 100.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 675.000.000	
			60 Kammu Utara	69 Godide	76 Godide	43	TH 3	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 215.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 215.000.000	
		39 Delyai	61 Tigi dan Tigi Barat		77 Tigi dan Tigi Barat	52	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 260.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 260.000.000	
			62 Tigi Timur, dan Bouwobado		78 Tigi Timur, dan Bouwobado	25	TH 1	1 Bantuan Stimulan Pemberdayaan KAT	Rp 5.000.000	Rp 125.000.000	
					TOTAL BANTUAN					Rp 125.000.000	
					TOTAL BANTUAN PER PROVINSI					Rp 7.515.000.000	
20	Provinsi	39 Kabupaten	62 Kecamatan	69 Desa	78 Lokasi	3500	KK	TOTAL NILAI BANTUAN		Rp 36.875.000.000	

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL

Jl. Salemba Raya No 28, Jakarta Pusat



dayasosbisa



dayasosbisa



Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial